



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021

BAGIAN ORGANISASI - SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Jawa Timur, Indonesia



<https://www.blitarkab.go.id>

admin@blitarkab.go.id

Telpon (0342) 5559555



## KATA PENGANTAR

LKjIP Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 yang juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah. LKjIP Tahun 2021 adalah tahap ke-1 (Awal RPJMD 2021-2026) siklus SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan, penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2021, adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi akibat resesi global dipicu oleh Pandemi Covid-19. Kabupaten Blitar berhasil melakukan pemulihan ekonomi dengan angka pertumbuhan 3,02%. Capaian angka TPT Kabupaten Blitar sangat rendah yaitu 3,66% dan ini jauh di bawah capaian Provinsi Jawa Timur 5,74% dan bahkan nasional 6,49%. Angka kemiskinan juga rendah yaitu 9,65% atau sekitar 112.650 jiwa. Angka ini juga di bawah Provinsi Jawa Timur yaitu 11,09%. Capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 terhadap 9 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja adalah sebesar 109,84% atau kategori **Sangat Berhasil** dan serapan anggaran rata-rata sebesar 90,70% sehingga terjadi **Efisiensi** kinerja rata-rata sebesar **19,14%**. Efisiensi kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu rata-rata efisiensi 8,62% atau meningkat **10,59%**. Meskipun dengan menggunakan *refocusing* anggaran.

Strategi dan kebijakan kedepan yang ditempuh antara lain 1)percepatan pemulihan ekonomi; 2) penyelarasan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD dan Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja yang sudah ditetapkan; dan 3) sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan selaras dengan target-target daerah dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Blitar

Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridlo kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar cepat memulihkan ekonomi dan memacu percepatan pencapaian visi Kabupaten Blitar.

Blitar, 25 Maret 2022

BUPATI BLITAR



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum.....	3
1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	11
1.5 Dasar Hukum .....	11
1.6 Isu-Isu Strategis .....	12
1.7 Proses Bisnis Pemerintah Daerah .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis .....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	17
2.3 Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	41
3.2 Capaian Kinerja Makro Ekonomi Daerah.....	103
3.3 Serapan Anggaran.....	105
<b>BAB IV PENUTUP DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	111
4.2 Tindak Lanjut.....	114



## DAFTAR GRAFIK

Grafik Piramida Penduduk Tahun 2021 .....	5
Grafik Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan .....	7
Grafik Angka Kemiskinan.....	9
Grafik Angka TPT .....	10
Grafik Indeks Pembangunan Manusia.....	10
Grafik HLS dan RLS .....	52
Grafik Usia Harapan Hidup .....	53
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender .....	55
Grafik Jumlah Penumpang Angkutan Umum .....	62
Grafik Nilai SAKIP .....	67
Grafik Angka TPT .....	73
Grafik Nilai IKM Layanan Perijinan.....	75
Grafik Nilai Realisasi Investasi .....	76
Grafik Pengeluaran Perkapita.....	77
Grafik Jalan Kabupaten Blitar Kondisi Baik .....	81
Grafik Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik.....	81
Grafik Prosentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas .....	82
Grafik Indeks Risiko Bencana .....	84
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH.....	85
Grafik Perkembangan PDRB ADHK .....	92
Grafik Jumlah Kunjungan Wisata .....	98
Grafik Perbandingan Indikator Kinerja Makro Ekonomi Daerah .....	104



## DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah, Kepadatan Penduduk dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021 .....	5
Tabel Indikator Pertumbuhan Ekonomi .....	8
Tabel Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 .....	18
Tabel Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar Perubahan Tahun 2021 .....	23
Tabel Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 .....	27
Tabel Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 .....	30
Tabel Matriks Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 .	34
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021	41
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	44
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1 .....	45
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	47
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2 .....	49
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	51
Tabel HLS dan RLS .....	52
Tabel Usia Harapan Hidup .....	54
Tabel Indeks Pemberdayaan Gender .....	55
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3 .....	55
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.....	58
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 4 .....	59
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.....	59
Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat .....	60
Tabel Jumlah Penumpang Angkutan Umum.....	63
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 5 .....	64
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.....	66
Tabel Nilai SAKIP.....	67
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 6 .....	70
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.....	73
Tabel Angka TPT .....	74
Tabel Nilai IKM Layanan Perijinan .....	75
Tabel Nilai Realisasi Investasi .....	76
Tabel Pengeluaran Perkapita .....	77
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 7 .....	77
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.....	80
Tabel Realisasi Kinerja Layanan Infrastruktur.....	80
Tabel Jalan Kabupaten Blitar Kondisi Baik .....	81
Tabel Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik .....	82
Tabel Prosentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas.....	83
Tabel Indeks Risiko Bencana .....	84
Tabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	85
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 8 .....	88
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.....	91
Tabel Perkembangan PDRB ADHK .....	93
Tabel Jumlah Produksi Ternak .....	97
Tabel Jumlah Populasi Ternak dan Unggas .....	98
Tabel Jumlah Kunjungan Wisata.....	99
Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 9 .....	99



Tabel Perbandingan Capaian Beberapa IKU Terhadap Capaian Kinerja Regional Dan Nasional Tahun 2021.....	104
Tabel Serapan Anggaran .....	105
Tabel Ringkasan Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi Kinerja.....	112





# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah pilar penting terwujudnya *Good public governance* (GPG) instansi pemerintahan. *Good public governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator

### **Bab 1 Berisi:**

- A. Latar Belakang*
- B. Gambaran Umum Daerah*
- C. Maksud dan Tujuan*
- D. Dasar Hukum*
- E. Isu-isu Strategis*
- F. Peta Proses Bisnis*

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Blitar tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD ini memiliki sebanyak 4 misi yang diuraikan, 4 tujuan, 9 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Penetapan sasaran strategis Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kinerja Bupati Blitar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021. Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 tersebut dilakukan dengan menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2021 yang memberikan prioritas kepada 134 program kegiatan yang salah satu diantaranya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya termasuk kegiatan peningkatan kinerja pemerintahan daerah yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP).

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Blitar Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai kebijakan strategis dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP antara lain: 1) melakukan peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam menyusun LKjIP; 2) menyusun peta proses bisnis mulai dari tingkat instansi pemerintahan sampai dengan perangkat daerah menjadi landasan kerja perangkat daerah untuk mencapai target kinerja; 3) meningkatkan sinkronisasi indikator kinerja secara *crosscutting* dan *cascading* pemerintah daerah, perangkat daerah, eselon III, IV sampai ke indikator kinerja individu bagi staf; 4) menerapkan sistem manajemen manajemen data kinerja dalam rangka mengukur capaian kinerja secara periodik

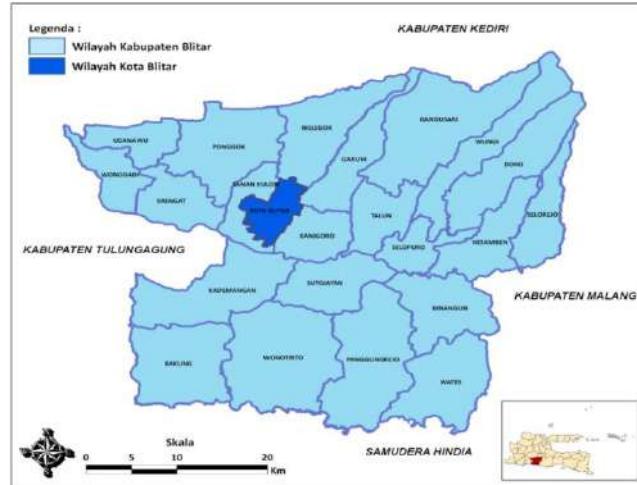
sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dikendalikan; dan 5) mendorong setiap perangkat daerah untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga berupaya terus meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran strategis, melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan dilandasi semangat Reformasi Birokrasi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

## 1.2. Gambaran Umum

### Letak Geografis

Kabupaten Blitar yang secara geografis terletak antara  $111^{\circ}40' - 112^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}58' - 8^{\circ}9'5''$  Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Posisi yang geografis strategis ini menjadikan salah satu kabupaten yang berkembang cepat di bagian selatan wilayah Propinsi Jawa Timur.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar

Dengan ketinggian ± 167 meter dan luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan, kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan adanya wilayah

pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, maupun pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Bagian utara memiliki kemiringan yang bervariasi, yaitu 2% - 15%, 15% - 40% dan diatas 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2. Bagian tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Sisi timur bagian ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3. Bagian selatan merupakan wilayah yang sebagian besar berupa perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari daerah ini yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Juni sampai Oktober. Sedangkan musim penghujan antara bulan November sampai Mei dengan jumlah curah hujan 2.467 hingga 8.282 mm/bulan. Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok, sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter di atas permukaan air laut (dpl) hingga mencapai 350 meter dpl.

Adapun morfologi dataran terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar yang dibentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0 sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

## **Wilayah Administratif dan Demografi**

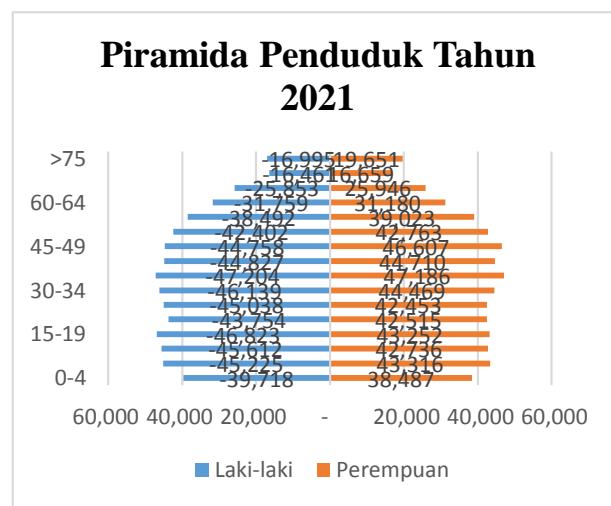
Secara administratif, Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan yang terdiri atas 28 kelurahan dan 220 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Blitar tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,79% yakni dari 1.223.745 jiwa tahun 2020 menjadi 1.231.013 jiwa pada tahun 2021 yang tersebar di 22 kecamatan. Hal ini berarti terjadi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,79% di tahun 2021 atau rata-rata selama 4 tahun sebesar 0,47%. Tingkat kepadatan penduduk dari tahun ke tahun juga terus meningkat, meskipun tergolong lambat. Jika pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk adalah sebanyak 664 jiwa/km<sup>2</sup> maka pada tahun 2021 naik menjadi 782 jiwa/km<sup>2</sup> atau rata-rata naik sebesar 12 jiwa/km<sup>2</sup> selama 5 tahun terakhir. Data rinci perkembangan kependudukan tersaji sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah, Kepadatan Penduduk dan Perkembangan Penduduk**  
**Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021**

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah	Km2	1.744,32	1.744,32	1.744,32	1.744,32
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.157.500	1.160.677	1.223.745	1.231.013
7	Kepadatan Penduduk	Jw/Km	664	665	702	782
8	Pertumbuhan Penduduk	%	0,32%	0,27%	0,89%	0,79%
9	Perkembangan Penduduk	Jiwa	29.949	3.177	63.068	7.268

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022.

Untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan usia, disajikan piramida penduduk pada gambar berikut. Piramida penduduk sangat penting untuk melihat rasio ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya masuk kategori bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan usia angkatan kerja.



Dari gambar piramida di atas terlihat memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Jumlah penduduk usia muda lebih besar atau menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Berdasarkan Data Jumlah Penduduk sensus 2015, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 784.747 jiwa (67,38%) cukup dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-14 tahun sejumlah 237.100 jiwa (20,36%) maupun usia lebih dari 65 tahun sejumlah 142.802 jiwa (12,26%). Dengan proporsi jumlah penduduk usia produktif dan non produktif tersebut, maka rasio ketergantungan penduduk dihasilkan angka 48,41, dimana setiap dua orang yang berusia kerja dan produktif menanggung satu orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial besar untuk dikembangkan.

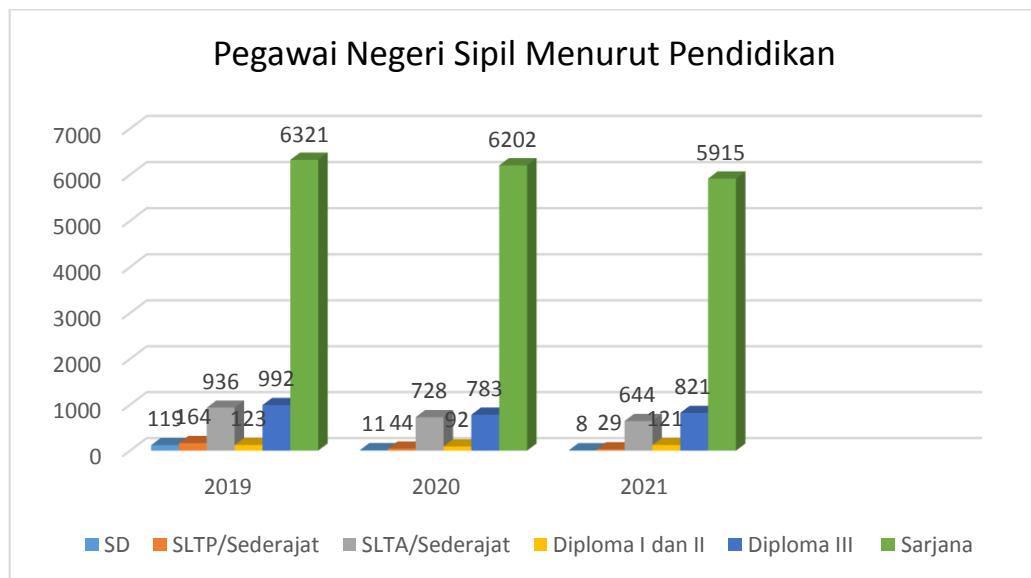
### **Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati. Selain itu, Bupati dibantu pula oleh Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan.

### **Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk kualitas tenaga kerja atau SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus diupayakan semakin ditingkatkan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sejumlah 7.538 personil. Dalam kurun waktu dua tahun terahir jumlah PNS di Kabupaten Blitar mengalami penurunan. Tahun 2020 jumlah PNS sebanyak 7.860 personil dan di tahun 2019 sebanyak 8.655 personil. Jika dibandingkan dengan jumlah PNS di tahun 2021 jumlah PNS tersebut berkurang sebesar 4,1% dari tahun 2020 dan sebesar 12,9% dari tahun 2019. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 3.042 orang (40,36%) dan PNS perempuan sebanyak 4.496 orang (59,64%). Jumlah ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai

perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana disajikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Blitar terdiri atas orang-orang dengan berbagai jenjang pendidikan yang dijelaskan pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi pendidikan Sarjana dan Magister menempati urutan pertama dengan jumlah **5.915 pegawai** dari total 7.538 pegawai dan mengalami penurunan sebesar 287 pegawai dari tahun 2020 dan 406 pegawai dari tahun 2019. Kemudian diikuti oleh PNS dengan pendidikan Diploma D1, D2, dan D3 berjumlah **942 pegawai** yang meningkat bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 875 pegawai dan menurun dari tahun 2019 sebesar 1.115 pegawai. Proporsi paling sedikit berpendidikan SLTA ke bawah bawah dengan jumlah **681 pegawai** yang menurun bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 783 pegawai dan tahun 2019 sebesar 1.219 pegawai.

### 1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia. Aspek kesejahteraan ini sangat terkait dengan kondisi perekonomian daerah. Ekonomi Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021 yaitu sebesar 3,02% atau naik sebesar 5,31% dari tahun 2020 yang sebelumnya sempat terkontraksi negatif sebesar -2,29% di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang

telah memicu krisis ekonomi global. Sedangkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang selama 2016 – 2019 selalu positif dengan rata-rata 5,09%.

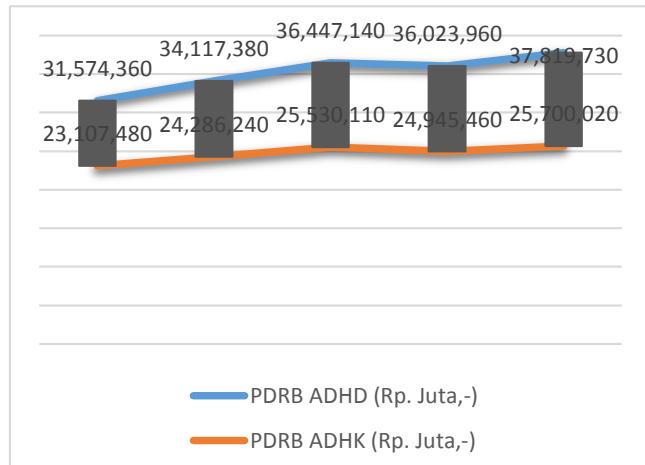
**Tabel 1.3**  
**Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10%	5,12%	-2,29%	3,02%
2.	PDRB ADHB (Rp. Juta,-)	34.117.380	36.447.140	36.023.960	37.819.730
3.	PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta,-)	24.286.240	25.530.110	24.945.460	25.700.020
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.157.500	1.160.677	1.223.745	1.231.013
5.	PDRB Perkapita ADHB (/th/jiwa)	29.475.058	31.401.622	29.437.473	30.722.446
6.	PDRB Perkapita ADHK (/th/jiwa)	20.981.633	21.995.878	20.384.525	20.877.131
7.	Angka Kemiskinan	9,72%	8,94%	9,33%	9,65%
8.	Angka TPT	3,37%	3,11%	3,82%	3,66%

*Sumber: Kab. Blitar Dalam Angka Tahun 2022*

Angka PDRB tahun 2021 juga mengalami kenaikan, dimana PDRB ADHB tahun 2020 sebesar Rp. 36.023,96 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp.1.795,77 miliar menjadi sebesar Rp.37.819,73 miliar di tahun 2021 dan PDRB ADHK tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.25.700 miliar dari Rp.24.945,46 miliar di tahun 2020 atau naik sebesar Rp.754,56 miliar.

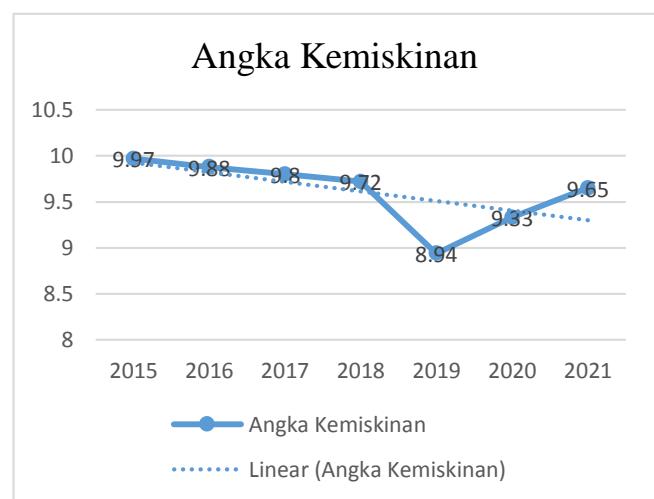
Selanjutnya, dengan laju pertambahan penduduk 0,79%, maka juga terjadi perubahan kenaikan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Blitar. Menurut ADHB yaitu Rp.29.437.473/tahun/per jiwa di tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp. 30.722.446/tahun/per jiwa di tahun 2021 atau naik sekitar Rp.1.284973/tahun/jiwa. Sedangkan, untuk pendapatan perkapita rata-rata penduduk berdasarkan ADHK tahun 2020 juga terjadi kenaikan dari yaitu Rp. 20.384.525/tahun/per jiwa di tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp.20.877.131/tahun/per jiwa di tahun 2021 atau naik sebesar Rp.492.607/tahun/jiwa. Perkembangan ini telah memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Kenaikan PDRB dan pendapatan perkapita penduduk ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat makin membaik dan diharapkan akan



meningkatkan berbagai aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam meningkatkan produksi produk lokal.

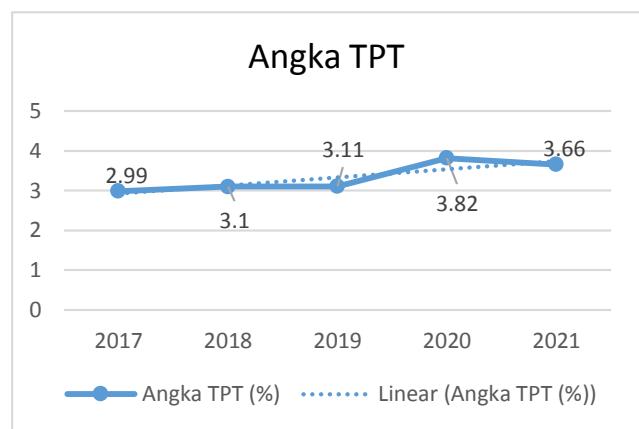
PDRB perkapita penduduk adalah indikator kesejahteraan penduduk yang diukur dari rata-rata pendapatan per orang pertahun. Kabupaten Blitar selalu memiliki kenaikan pendapatan perkapita penduduk sampai tahun 2021 dengan kenaikan rata-rata 4,68% per tahun. Di tahun 2020, sempat terjadi penurunan akibat dari Pandemi Covid-19 karena adanya kontraksi pertumbuhan -2,29. Tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 3,02%, sehingga tingkat pendapatan perkapita penduduk kembali naik menjadi sebesar Rp.37.819.730/tahun/jiwa di tahun 2021. Kondisi ini telah menjadi dampak berantai dari semakin baiknya pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu angka kemiskinan.

Persentase penduduk Kabupaten Blitar yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami selama 5 tahun, 2015 - 2019 terus mengalami penurunan secara moderat rata-rata 0,43% per tahun di mana tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 9,97% dan terus menurun dan pada tahun 2019 tinggal 8,94% dengan rata-rata angka kemiskinan 9,66%. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 akibat resesi ekonomi dunia, kondisi ekonomi daerah turun sehingga telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Akibatnya, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Blitar meningkat sebesar 0,39% menjadi 9,83% tahun 2020 atau sekitar 108.550 jiwa dan pada tahun 2021 kembali naik 0,32% menjadi 9,65% atau sekitar 112.650 jiwa. Namun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Blitar masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,59% dan Nasional sebesar 9,71%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini.



Kabupaten Blitar menorehkan sejarah dalam angka pengangguran terbuka (TPT) dimana selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 6 tahun terakhir menunjukkan angka tren menurun secara moderat, yaitu 0,06%, pertahun dimana tahun 2014 sebesar 3,64% dan terus menurun menjadi 2,99% tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan dan puncaknya pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,83%, yang merupakan angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir dan seiring dengan resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19, aktivitas terjadi PHK besar-besaran dari sektor formal produksi, yang akibatnya telah mendorong peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Blitar segera cepat pulih dengan turunnya angka TPT tahun 2021 sebesar 0,16% menjadi 3,66%. Kondisi ini menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Blitar karena pada tahun yang sama hampir seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan angka TPT. Capaian angka TPT Kabupaten Blitar tahun 2021 ini tetap masih jauh di bawah angka TPT Jawa Timur yaitu 5,74% dan nasional 6,49%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Capaian kinerja ini menunjukkan pembangunan Kabupaten Blitar berbasis sektor pertanian masih mampu memiliki tingkat produksi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang tumbuh positif 3,02% juga telah mendorong pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun dari 4 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Penduduk. IPM Kabupaten Blitar menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif sejak tahun 2015 sebesar rata-rata 0,43 poin. Angka IPM tahun 2015



angka IPM sebesar 69,33 poin yang terus meningkat sampai dengan tahun 2021 menjadi



sebesar 71,05. Capain angka IPM tahun 2021 ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur 72,14 poin dan IPM Nasional 72,29 poin. Angka IPM Kabupaten Blitar termasuk kategori menengah di Indonesia dan menempati peringkat ke 22 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar selama satu tahun kerja, dengan tujuan:

- a. Sebagai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat;
- b. Memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021, yang merupakan periode tahun pertama dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026;
- c. Memberikan informasi capaian sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2021 guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berikutnya;
- d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **1.5. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

## **1.6. Isu-Isu Strategis**

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026 telah diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Analisis dilakukan terhadap kondisi lingkungan strategis baik pada tingkat nasional, provinsi sampai lokal daerah. Sehingga mampu dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan prioritas daerah. Hasil analisis menghasilkan sebanyak 12 isu-isu strategis daerah yang akan menjadi dasar arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Keberpihakan terhadap keberdayaan perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak, perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal dan non formal.

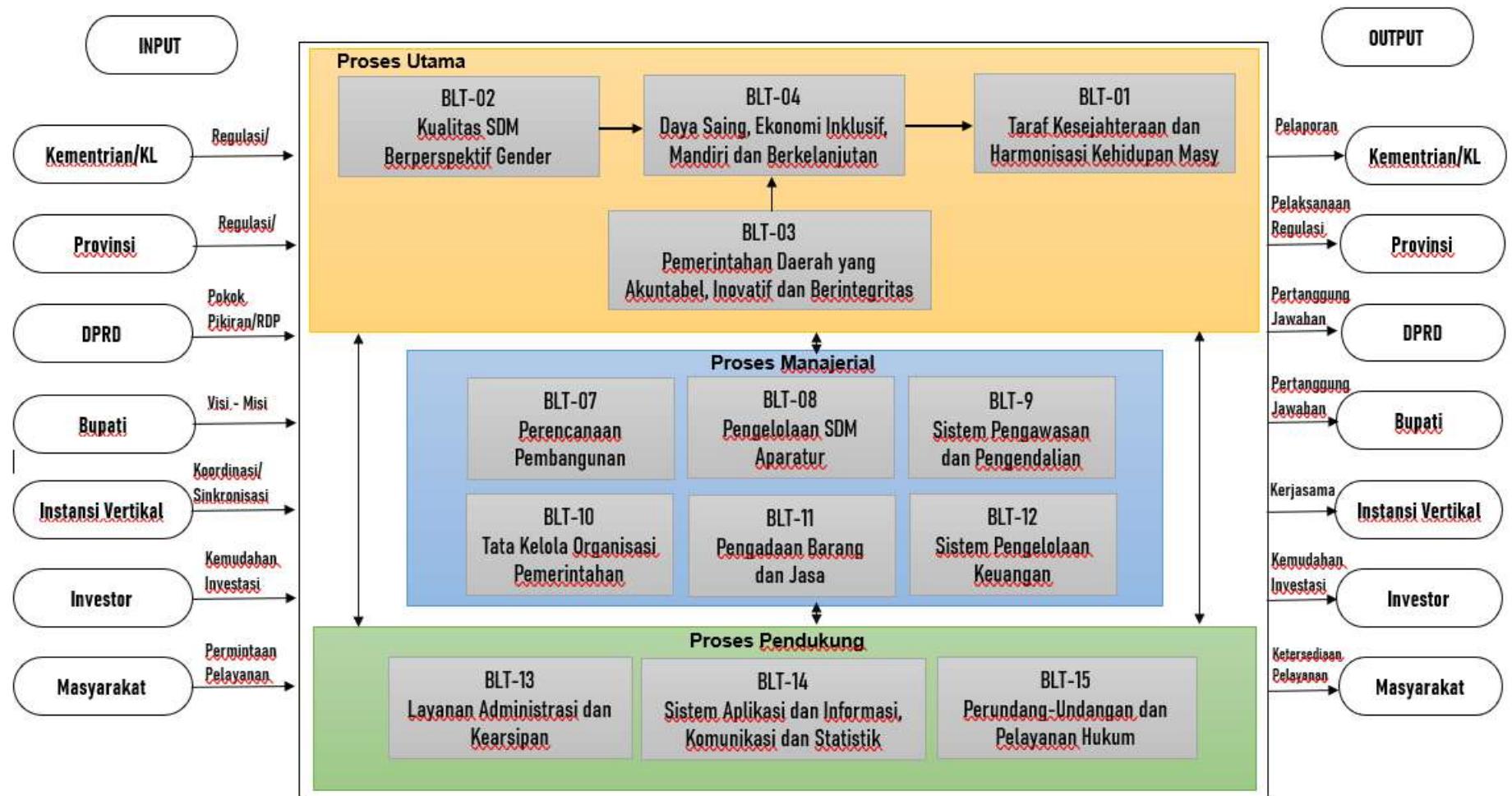
3. Memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
4. Percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
5. Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
6. Tututan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
7. Pengembangan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD.
8. Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
9. Akselerasi pembangunan kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.
10. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana.
11. Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih.
12. Integrasi treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.

Tahun 2020 telah terjadi resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada perekonomian daerah yaitu Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi -2,29% dari rata-rata pertumbuhan di atas 5,10% selama 5 tahun. Pendapatan pekapita penduduk juga mengalami penurunan yaitu dari 31,38 juta per tahun menjadi 30,93 juta per tahun untuk ADHB dan untuk ADHK tahun 2020 turun dari 21,99 juta pertahun menjadi 21,42 juta pertahun. Seiring dengan agresifitas pemulihan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh positif sebesar 3,02%. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kembali turun menjadi 3,66% di tahun 2021 dan jauh di bawah Provinsi Jawa Timur yaitu 5,74%. Meski demikian, angka kemiskinan masih tetap tinggi yaitu 9,65% atau sebanyak 112.620 jiwa. Meski demikan, angka kemiskinan ini masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,4%. Pemerintah daerah terus

melakukan kebijakan pemulihan ekonomi secara massif dan progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## 1.7. Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Proses bisnis pemerintah Kabupaten Blitar disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021. Proses utama pemerintah daerah terdiri dari 4 proses yang saling terkait, yaitu proses utama peningkatan kualitas SDM berperspektif Gender (BLT-02), mendorong proses utama peningkatan daya saing ekonomi yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan (BLT-04) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat (BLT-01). Proses utama tata kelola pemerintahan mendukung daya saing ekonomi yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan. Proses bisnis ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai dasar untuk mendesain program dan kegiatan prioritas bagi daerah.





## BAB **2** PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

#### Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang dihadapi, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2006 - 2026, Visi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah : “**TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)**”. Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- **Blitar Mandiri**, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.
- **Blitar Sejahtera**, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusifitas dan lingkungan asri yang berkualitas.
- **Akhlaq Mulia**, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.

#### **Bab 2 Berisi:**

- A. Perencanaan Strategis*
- B. Perjanjian Kinerja*
- C. Matriks RPJMD*

- *Baldatun, Thoyyibatun wa Robbun Ghafuur*, secara harfiah diartikan sebagai ”Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (*Baldatun Thoyyibatun*)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (*Rabbun Ghafuur*)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

## MISI

Visi Kabupaten Blitar di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu :

1. *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.*
2. *Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar.*
3. *Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas.*
4. *Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan.*

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, yang sudah disesuaikan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021. Penyusunan LKjIP tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD ini memiliki 4 misi yang diuraikan ke dalam 4 tujuan, 9 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. RPJMD disusun dengan berdasarkan hasil analisis isu-isu daerah sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2026 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan *good and clean governance*, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang kemudian dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja sebagai target kinerja Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuaraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Menurunnya kemiskinan	Angka 1	Angka kemiskinan (%)	8,65
		2	Pendapatan per kapita (juta rupiah/ Orang/Tahun)	40,35
		3	Indeks daya beli	0,7266
		4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,46
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	1	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	96,74

3	Terwujudnya stabilitas wilayah	1	Persentase penanganan konflik (%)	100
		2	Persentase penegakan PERDA (%)	100
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1	Indeks Pendidikan	0,66
5	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan	0,8220
6	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	78,50
7	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	A
		2	Nilai LPPD	3,0542
		3	Opini BPK	WTP
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadapa Layanan Publik	Sangat Baik
9	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	1	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB (%)	7,23
		2	Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB (%)	7,78
		3	Persentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB (%)	3,00
		4	Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	5.742.647.000
10	Meningkatnya pelayanan perijinan	1	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik
11	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71
		2	Presentase Ketaatan Tata Ruang (%)	85
12	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1	Persentase desa berstatus pratama (%)	0

Program		Anggaran (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	134.623.123.850
2.	Program Pengembangan Kurikulum	554.296.550
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.036.137.700
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	88.389.800
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	197.383.984.994
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	677.420.000
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	637.314.000

8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	231.050.000
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.161.308.000
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	26.522.551.250
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	7.829.153.350
12.	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	379.275.300
13.	Program Penyelenggaraan Jalan	70.882.535.476
14.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	184.859.000
15.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	670.489.300
16.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.086.242.170
17.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15,135,629,000
18.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,487,751,338
19.	Program Pengembangan Permukiman	16,389,691,954
20.	Program Pengembangan Perumahan	327,316,700
21.	Program Kawasan Permukiman	10,260,267,340
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	15,021,623,274
23.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	640,432,000
24.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,770,150,000
25.	Program Penatagunaan Tanah	440,039,400
26.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1,753,014,750
27.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanggulangan Bencana	338,247,850
28.	Program Penanggulangan Bencana	2,424,196,910
29.	Program Pemberdayaan Sosial	3,118,599,600
30.	Program Rehabilitasi Sosial	1,205,933,130
31.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,139,960,000
32.	Program Penanganan Bencana	2,003,797,875
33.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23,400,000
34.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	650,969,025
35.	Program Penempatan Tenaga Kerja	2,026,993,500
36.	Program Hubungan Industrial	386,209,500
37.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	134,977,275
38.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	75,092,000
39.	Program Perlindungan Perempuan	314,597,050
40.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	55,823,200
41.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	6,199,750
41.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25,115,335
43.	Program Perlindungan Khusus Anak	335,712,000
44.	Program Pengendalian Penduduk	166,270,400
45.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8,343,385,000
46.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	61,282,330
47.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	506,110,000
48.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	870,233,400

49.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	40,000,000
50.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	60,000,000
51.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,303,717,639
52.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,910,133,360
53.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	731,952,000
54.	Program Penyuluhan Pertanian	6,923,478,000
55.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	186,765,500
56.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	324,175,000
57.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	11,698,680,000
58.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	245,221,000
59.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,341,751,000
60.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20,781,000
61.	Program Pengelolaan Persampahan	4,686,919,100
62.	Program Pendaftaran Penduduk	1,054,630,500
63.	Program Pencatatan Sipil	283,495,000
64.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,374,692,700
65.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2,334,000
66.	Program Penataan Desa	259,550,000
67.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	679,784,000
68.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,348,797,600
69.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,008,751,350
70.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,405,135,500
71.	Program Aplikasi Informatika	5,570,083,250
72.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	269,556,200
73.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6,175,750
74.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	85,578,400
75.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	249,999,800
76.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	250,000,000
77.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	991,181,000
78.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	585,578,400
79.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	850,190,000
80.	Program Pengembangan Umkm	845,000,000
81.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199,750,750
82.	Program Promosi Penanaman Modal	404,394,000
83.	Program Pelayanan Penanaman Modal	110,723,300
84.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	496,730,600
85.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38,786,750
86.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	492,110,000
87.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,943,310,000
88.	Program Pengembangan Kebudayaan	1,355,425,850
89.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	55,143,000
90.	Program Pengelolaan Permuseuman	659,999,750

91.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	902,519,750
92.	Program Pemasaran Pariwisata	1,003,695,320
93.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	915,667,600
94.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	510,000,000
95.	Program Pembinaan Perpustakaan	367,344,800
96.	Program Pengelolaan Arsip	355,354,500
97.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	3,685,800
98.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	346,523,250
99.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,783,071,750
100.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,881,134,240
101.	Program Perizinan Usaha Pertanian	30,000,000
102.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	258,707,400
103.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,877,940,750
104.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Brg Penting	45,782,600
105.	Program Pengembangan Ekspor	590,431,800
105.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	192,196,500
107.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	188,325,000
108.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	622,420,400
109.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	100,000,000
110.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	322,720,425
111.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5,656,806,800
112.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,817,346,800
113.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11,236,036,400
114.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,537,607,200
115.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,175,106,100
116.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,078,337,000
117.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	377,650,267,859
118.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	852,955,000
119.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,400,472,200
120.	Program Kepegawaian Daerah	2,712,438,400
121.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,563,588,400
122.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,431,256,000
123.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,024,389,000
124.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	615,512,500
125.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	1,453,019,400
126.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	393,210,000
127.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	470,270,000
128.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	955,064,000
129.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	208,234,547

130.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	284,213,200
131.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	822,617,900
132.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	869,355,200
133.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15,453,805,621
134.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,190,225,496,441
	<b>TOTAL</b>	<b>2.314.922.540.528</b>

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Blitar Perubahan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PPKS (%)	11,70
2	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat	1	Indeks Kesalehan Sosial (indeks)	80
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,46
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,39
		3	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,52
4	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,44
5	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,94
6	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Nilai SAKIP (indeks)	B
		2	Indeks SPBE (indeks)	3,2
		3	Indeks Sistem Merit (indeks)	135
		4	Persentase Desa Mandiri (%)	4,55
		5	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	60,15
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (tingkat)	3,72
		2	Pengeluaran Perkapita (000)	11.152
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1	Indeks Infrastruktur (indeks)	66,88
		2	Indeks Risiko Bencana (indeks)	160,62
		3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	64,90
9	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1,03
		2	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	0,95

		Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	
3	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	1,76	
4	Jumlah Kunjungan Wisata (iumlah)	1.609.379	
5	ICOR	5,80	

<b>Program</b>		<b>Anggaran (Rp.)</b>
1.	Program Pemberdayaan Sosial	3.355.967.730
2.	Program Rehabilitasi Sosial	887.426.406
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.134.993.438
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	620.726.223
5.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	320.059.300
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	504.942.036
7.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	759.536.600
8.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.058.500.039
9.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.113.833.706
10.	Program Pengelolaan Pendidikan	162.498.302.388
11.	Program Pengembangan Kurikulum	16.040.846.209
12.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	38.777.754.545
13.	Program Pembinaan Perpustakaan	778.997.882
14.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.470.504.406
15.	Program Perlindungan Perempuan	753.386.578
16.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.158.948.734
17.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1.213.526.232
18.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	36.751.562
19.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.003.602.769
20.	Program Pemenuhan Hak Anak	577.797.421
21.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	231.981.644.613
22.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.286.182.000
23.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	685.000.000
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.468.894.750
25.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.710.039.299
26.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.075.000.000
27.	Program Pelayanan Penanaman Modal	398.191.739
28.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	144.724.875
29.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	609.873.070
30.	Program Pendaftaran Penduduk	200.000.000
31.	Program Pencatatan Sipil	200.000.000
32.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.000.000.000
33.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	965.768.704
34.	Program Administrasi Umum	25.957.718.039

35.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.625.342.480
36.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.810.094.580
37.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.470.584.249
38.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.476.255.846
39.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	988.350.068
40.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	385.849.254.212
41.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.446.822.659
41.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.899.146.786
43.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.824.955.653
44.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.306.170.591
45.	Program Pengelolaan Arsip	184.462.063
46.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	20.284.231
47.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.000.000.000
48.	Program Dukungan Yang Menangkan Tugas dan Fungsi DPRD	32.233.113.690
49.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.743.071.127
50.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.220.433.442
51.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6.227.158
52.	Program Kepegawaian Daerah	5.175.914.500
53.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.100.000.000
54.	Program Penataan Desa	100.000.000
55.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.221.878.565
56.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.353.439.200
57.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.741.177.302
58.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.831.299.871
59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.595.188.460
60.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	310.240.631
61.	Program Promosi enanaman Modal	525.241.639
62.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100.000.000
63.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	960.989.534
64.	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.781.055.749
65.	Program Penyelenggaraan Jalan	78.771.147.367
66.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	36.387.748.737
67.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	25.169.574.144
68.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.429.939.407
69.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.663.336.706
70.	Program Penataan Bangunan Gedung	17.755.055.212
71.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.353.950
72.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.262.923.292
73.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.000.000.000
74.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	20.701.267.144
75.	Program Kawasan Permukiman	12.149.777.138

76.	Program Pengembangan Perumahan	67.923.048
77.	Program Penanggulangan Bencana	2.455.812.152
78.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	528.040.059
79.	Program Penanganan Bencana	1.221.503.725
80.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.185.000.000
81.	Program Hidup Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000
82.	Program Pengelolaan Persampahan	4.224.644.650
83.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	235.000.000
84.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-
85.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.000.000.000
86.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan idup Untuk Masyarakat	321.000.000
87.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	61.560.353
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.205.022.050
90.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.121.148.862
91.	Program Pengembangan Kelembagaan Pertanian	1.021.751.041
92.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.956.787.986
93.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.281.201.145
95.	Program Penyuluhan Pertanian	4.285.615.490
97.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	799.000.000
98.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.004.100.101
99.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000
100.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro	1.174.070.732
101.	Program Pengembangan UMKM	1.275.315.376
102.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	407.608.946
103.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.183.568.395
104.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	815.260.962
105.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	672.344.817
106.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.182.369.473
107.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	185.000.000
108.	Program Pengembangan Ekspor	610.000.000
109.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.795.755.888
110.	Program Pemasaran Pariwisata	1.483.066.231
111.	Program Pengembangan SD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.445.000.000
112.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.416.373.123
113.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	699.164.660
114.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	410.556.929
115.	Program Pengelolaan Permuseuman	1.000.860.002
<b>TOTAL</b>		<b>2.314.922.540.528</b>

## 2.3. Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

**Matriks**  
**Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021**

<b>VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”</b>										
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>		<b>TARGET INDIKATOR KINERJA</b>				
				<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Misi I : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat</b>										
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. Indeks Gini	1. Menurunnya Angka Kemiskinan  2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Angka Kemiskinan (%)  Pendapatan per kapita (juta rupiah/ Orang/ Tahun)  Indeks daya beli  Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,97	9,88	9,62	9,37	9,12	8,88	8,65
				23,39	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
				0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,70	0,70
				2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
			Percentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	n/a	75,86	78,49	81,92	86,20	91,51	96,74
<b>Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum</b>										
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Percentase penegakan PERDA	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	Percentase penanganan konflik	100	100	100	100	100	100	100
			Pesentase penegakan PERDA	95	95	95	95	95	95	100

<b>Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>										
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	0,60	0,62	0,63	0,64	0,66
		5. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8122	0,8137	0,8154	0,8170	0,8187	0,8203	0,8220
		6. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	75,08	75,61	76,13	77,20	77,50	78,10	78,50
<b>Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>										
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	7. Meningkatnya efektibilitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	BB	BB	A
			Nilai LPPD	2,8841	3,0515	3,0525	3,0530	3,0535	3,0540	3,0542
			Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
<b>Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing</b>										
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata	Percentase pertumbuhan sektor Perdagangan pada PDRB	6,23	6,23	6,43	6,63	6,83	7,03	7,23
			Percentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	6,13	6,13	6,38	6,63	6,88	7,13	7,38

			Persentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	4,05	3,21	3,15	3,10	3,05	3,00	3,00
			Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	1.688.815.031	2.490.356.411	3.112.945.513	3.486.498.975	3.984.159.360	4.607.159.360	4.980.712.822
		10. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67	68	69	70	71
			Persentase Ketaatan Tata Ruang	75	77	79	80	82	84	85

**Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dana Kawasan Pedesaan**

6. Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa berstatus pratham	12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa berstatus pratama	22,7	20,45	16,36	11,81	7,27	3,64	0
----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	------	-------	-------	-------	------	------	---

# Matriks

## Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026

NO	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Percentase Penduduk Miskin	Persen	9,33	9,30	9,25	9,02	8,94	8,90	8,88
		Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Percentase PPKS	Persen	11,76	11,7	11,62	11,51	11,31	11,11	10,76
		Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai – nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong royong dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
2	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berperspektif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,70	92,76	92,83	92,90	92,97	93,03	93,10
			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,58	71,15	71,48	72,06	72,52	72,97	73,42
		Meningkatnya	Harapan Lama	Tahun	12,46	12,54	12,65	12,77	12,90	13,05	13,19

	Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar	Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah (HLS)								
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,39	7,45	7,51	7,58	7,64	7,71	7,78	
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,52	73,62	73,72	73,89	74,04	74,27	74,54	
	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	54,44	55,23	56,02	56,80	57,59	58,37	
3	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,66	62,56	64,46	65,96	67,46	68,96	70
		Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,94	81,94	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24
		Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	B	BB	BB	A	A
			Indeks SPBE	Indeks	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,95	4,1
			Indeks Sistem Merit	Indeks	99	135	200	230	255	280	305
			Percentase Desa Mandiri	%	4,09	4,55	5,91	7,27	8,18	9,09	10
			Indeks Inovasi	Indeks	n/a	65,25	70,25	75,25	80,25	85,25	87,25

			Daerah								
4	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan	Gini Rasio	Ratio	0,330	0,328	0,329	0,340	0,333	0,332	0,331
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKU)	Indeks	n/a	70 (Baik)	72 (Baik)	74 (Baik)	76 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)
			Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,29	2,17	4,56	7,58	5,32	5,49	5,20
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat	3,82	3,72	3,52	3,4	3,25	3,17	2,99
			Pengeluaran Perkapita (000)	Rupiah	10,654	11,152	11,480	13,794	12,812	12,466	12,155
		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Indeks	66,07	66,88	67,83	70,80	72,77	74,53	76,66
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	160,26	157	154	151	148	145	142
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,35	64,90	65,45	66,00	66,54	67,09	67,64
		Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,06	1,03	1,87	2,97	2,49	2,58	2,40
			Pertumbuhan PDRB	%	-7,24	0,95	4,61	12,04	6,73	6,82	6,60

			Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor								
			Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	-5,26	1,76	4,14	15,04	7,82	8,11	7,47
			Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	1.532.742	1.609.379	1.754.223	1.836.112	2.203.334	2.754.168	3.029.584
			ICOR	Indeks	n/a	5,82	5,80	5,73	5,75	5,74	5,76

### 2.3. Matriks Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan anak, difable, penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengentasan masyarakat miskin secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin aktualisasi dan implementasi regulasi terkait melalui monitoring dan evaluasi yang konkret.</li> <li>• Meningkatkan persentase penanganan PPKS.</li> <li>• Membangun kemitraan penyelenggaraan pelayanan sosial.</li> <li>• Meningkatkan validitas data kesejahteraan sosial serta pemutakhiran secara berkala melalui pengaplikasian teknologi informasi terintegrasi hingga level desa.</li> <li>• Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran berbasis data yang valid.</li> <li>• Meningkatkan relasi kolaboratif dalam penyelenggaraan urusan sosial bersama komunitas peduli sosial.</li> <li>• Peningkatan kualitas penanganan kemiskinan.</li> <li>• Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran beserta keluarganya.</li> <li>• Meningkatkan afirmasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.</li> </ul>
2.	Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB Sarana Sebagai Lini Terdepan dalam Menghambat Penyebaran Radikalisme dan Terorisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil.</li> <li>• Penguatan institusionalisasi FKUB Kabupaten Blitar.</li> <li>• Melestarikan modal sosial positif Kabupaten Blitar.</li> <li>• Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.</li> </ul>
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pemerataan akses, kualitas dan pemenuhan standar serta sarana/prasarana pelayanan pendidikan yang berkarakter dan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Peningkatan optimalisasi penggunaan 20% alokasi dana APBD daerah untuk pendidikan</li> <li>• Mengakselerasi Peningkatan TK Negeri di Kabupaten Blitar</li> </ul>

		<p>yang modern dengan memperhatikan keadilan gender dan afirmasi terhadap perlindungan perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Right sizing Satuan pendidikan</li> <li>• Meningkatkan kualitas kurikulum lokal untuk menyiapkan generasi muda dalam pasar tenaga kerja</li> <li>• Mengelaborasi dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum sekolah negeri di Kabupaten Blitar</li> <li>• Meningkatkan keinginan bersekolah masyarakat Kabupaten Blitar melalui event-event pendidikan dan kebudayaan</li> <li>• Peningkatan Layanan Pendidikan di jenjang PAUD, SD dan SMP bagi anak berkebutuhan khusus</li> <li>• Menurunkan jumlah pengguna narkoba terkhusus di kalangan pelajar</li> <li>• Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana sekolah</li> <li>• Optimalisasi penggunaan dana BOS</li> <li>• Peningkatan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Peningkatan optimalisasi penggunaan 10% alokasi dana APBD daerah untuk kesehatan</li> <li>• Implementasi Regulasi Kesehatan Secara Tegas</li> <li>• Peningkatan afirmasi terhadap mahasiswa kedokteran asal Kabupaten Blitar</li> <li>• Percepatan pengentasan stunting</li> <li>• Peningkatan UHC menjadi 100%</li> <li>• Mengoptimalkan momentum kepemimpinan kepala daerah perempuan saat ini untuk meningkatkan dan memotivasi keberdayaan, kemandirian serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kabupaten Blitar</li> <li>• Meningkatkan Keberdayaan dan Perlindungan Perempuan</li> <li>• Meningkatkan Keberdayaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya</li> <li>• Meningkatkan pemahaman PD dan Pemdes terkait gender</li> <li>• Memfasilitasi event-event pemberdayaan perempuan dan mengakomodir aspirasi pembangunan keberdayaan dan kemandirian</li> </ul>
--	--	---

			<p>perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan penurunan perkawinan anak (perkawinan dibawah umur)</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Meningkatkan keberdayaan kemandirian pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkampanyekan nilai-nilai progresif dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan norma kebudayaan lokal daerah</li> <li>• Meningkatkan event-event kepemudaan sebagai media aktualisasi diri pemuda/pemudi</li> <li>• Mengoptimalkan peran pemuda/pemudi dalam pembangunan daerah dan khususnya pembangunan ekonomi dengan membuka jaringan aspirasi yang akonomdatif dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan</li> </ul>
5.	Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa	Layanan public yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi terintegrasi</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik</li> <li>• Mereduksi blank spot dan memelihara jangkauan internet eksisting</li> <li>• Penguatan efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa</li> <li>• Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi</li> </ul>
6.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyederhanaan birokrasi dan mental aparatur yang tanggu dan dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penerapan SPBE</li> <li>• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital</li> <li>• Optimalisasi transparansi pemerintahan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi</li> <li>• Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data pembangunan</li> <li>• Optimalisasi Transformasi Birokrasi</li> <li>• Peningkatan kinerja penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan</li> <li>• Optimalisasi penyederhanaan regulasi</li> <li>• Menguatkan dan memutakhirkkan</li> </ul>

			<p>pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasiOptimalisasi pengelolaan asset daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran data obyek pajak dan retribusi daerah</li> <li>• Meningkatkan Implementasi, Evaluasi dan Pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM aparatur Peningkatan pengelolaan /manajemen kepegawaian</li> <li>• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal</li> <li>• Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kabupaten Blitar</li> <li>• Mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</li> </ul>
7.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pengembangan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk investasi</li> <li>• Memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal pada investasi-investasi yang masuk Kabupaten Blitar</li> <li>• Fasilitasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan bersifat one to many (Keterampilan yang universal seperti operasionalisasi teknologi informasi, hospitality, Olahraga, dll)</li> <li>• Memaksimalkan bonus demografi</li> <li>• Mempermudah akses permodalan dan pasar terhadap usaha mikro</li> <li>• Mengoptimalkan peran forum CSR dalam pembangunan</li> </ul>
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksessibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Strategis, dan infrastruktur penunjang aksessibilitas, sarana prasana dasar dan mitigasi bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan infrastruktur penunjang aksessibilitas pariwisata dan sarpras pendukung lainnya</li> <li>• Mengoptimalkan pemeliharaan jalan agar tidak menghambat arus barang dan jasa</li> <li>• Meningkatkan pemerataan penyediaan sarana-prasarana jalan</li> <li>• Pembangunan sirip-sirip penghubung ke wilayah selatan</li> <li>• Pembangunan jalan ke destinasi-destinasi wisata wilayah selatan</li> <li>• Pengembangan infrastruktur dasar</li> </ul>

			<p>wilayah selatan Meningkatkan kualitas irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan air baku untuk irigasi</li> <li>• Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak</li> <li>• Meningkatkan akses air minum layak</li> <li>• Diseminasi informasi penataan ruang</li> <li>• Pengendalian alih fungsi lahan</li> <li>• Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan</li> <li>• Meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana</li> <li>• Menekan pencemaran sungai dan udara</li> <li>• Meningkatkan pengelolaan persampahan</li> <li>• Melaksanakan konservasi dan reabilitasi lahan kritis</li> <li>• Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia sesuai SOP</li> <li>• Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan</li> </ul>
9.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana produksi pertanian dan industri olahan hasil Pertanian-Peternakan-Perikanan, serta Kemitraaan dengan Daerah dan Pelaku Ekonomi dalam rangka Membantu Akses Terhadap Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakselerasi produktifitas dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan</li> <li>• Meningkatkan fasilitas penunjang sektor agribisnis dan pariwisata</li> <li>• Menginisiasi kawasan pertanian tematik dengan pengelolaan yang modern dan memiliki nilai tambah</li> <li>• Meningkatkan produksi pertanian menuju organic</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan bidang pertanian-peternakan-perikanan mulai pra sampai dengan pasca panen, mulai dari hulu hingga ke hilir</li> <li>• Menangkap peluang pertanian, peternakan dan perikanan non-mainstream</li> <li>• Mengelola potensi teknologi informasi dalam pengembangan produktifitas dan perluasan pasar pertanian-peternakan-perikanan</li> <li>• Meluaskan jaringan kemitraan/kerjasama pertanian dan peternakan daerah</li> <li>• Peningkatan cakupan pembinaan kelompok Nelayan Kecil</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan Kawasan Industri</li><li>• Peningkatan profesionalitas manajemen dan revitalisasi BUMD dan Pasar Daerah</li><li>• Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sektor pariwisata</li></ul>
--	--	--	--



## BAB **3** AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### **Bab 3 Berisi:**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Makro Ekonomi
- E. Analisis Efisiensi
- F. Capaian Prestasi

Sedangkan pemberian kategori pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	> 100%	Lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PPKS (%)	11,70	11,70	100%	SB
2	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat	2 Indeks Kesalehan Sosial (indeks)	80	81,74	102,19%	SB
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	3 Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,46	12,63	101,36%	SB
		4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,39	7,50	101,49%	SB
		5 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,52	73,61	100,12%	SB
4	Meningkatnya	6 Indeks Pembangunan	54,44	51,83	95,21%	B

	Kualitas Kepemudaan		Pemuda				
5	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.	7	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,94	81,08	100,17%	SB
6	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	8	Nilai SAKIP (indeks)	B	B	100%	SB
		9	Indeks SPBE (indeks)	3,2	2,76	86,25%	B
		10	Indeks Sistem Merit (indeks)	135	99	73,33%	B
		11	Persentase Desa Mandiri (%)	4,55	4,55	100	SB
		12	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	60,15	56,58	94,06%	B
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	13	Tingkat Pengangguran Terbuka (tingkat)	3,72	3,66	101,61%	SB
		14	Pengeluaran Perkapita (000)	11.152	10.757	96,46%	B
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	15	Indeks Infrastruktur (indeks)	66,88	78,60	117,52%	SB
		16	Indeks Risiko Bencana (indeks)	160,62	146,16	109%	SB
		17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	64,90	65,53	100,97%	SB
9	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	18	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1,03	0,01	0,97%	KB
		19	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	0,95	5,83	613,68%	SB
		20	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	1,76	2,45	139,20%	SB
		21	Jumlah Kunjungan Wisata (iumlah)	1.609.379	1.287.414	79,99%	B
		22	ICOR	5,80	7,05	121,38%	SB

Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan dari Kabupaten Blitar. Pemimpin pemerintahan baru dengan semangat baru berhasil meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah. Indikator aspek kesejahteraan, antara lain pertumbuhan ekonomi, mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021 yaitu sebesar 3,02% atau

naik sebesar 5,31% dari tahun 2020 yang sebelumnya sempat terkontraksi negatif sebesar -2,29% di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang telah memicu krisis ekonomi global. Sedangkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang selama 2016 – 2019 selalu positif dengan rata-rata 5,09%. Angka PDRB tahun 2021 juga mengalami kenaikan, dimana PDRB ADHB tahun 2020 sebesar Rp. 36.023,96 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp.1.795,77 miliar menjadi sebesar Rp.37.819,73 miliar di tahun 2021 dan PDRB ADHK tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.25.700 miliar dari Rp.24.945,46 miliar di tahun 2020 atau naik sebesar Rp.754,56 miliar. Sisi pendapatan per kapita penduduk, ADHB yaitu Rp.29.437.473/tahun/per jiwa di tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp. 30.722.446/ tahun/per jiwa di tahun 2021 atau naik sekitar Rp.1.284973/tahun/jiwa atau naik rata-rata 4,68% per tahun.

Indikator lain, adalah persentase penduduk miskin tahun 2020 dan 2021 akibat resesi ekonomi dunia, jumlah angka kemiskinan sedikit naik, yaitu 9,83% tahun 2020 (108.550 jiwa) naik 0,32% menjadi 9,65% (112.650 jiwa). Akan tetapi ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur 10,59% dan Nasional sebesar 9,71%. Kabupaten Blitar menorehkan sejarah dalam angka pengangguran terbuka (TPT) dimana selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 6 tahun terakhir menunjukkan angka tren menurun secara moderat Tahun 2021 terjadi penurunan dari 3,83% tahun 2020 menjadi 3,66% tahun 2021. Capaian ini menjadi prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar karena pada tahun yang sama hampir seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan angka TPT. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif sejak tahun 2015. Angka 2021 sebesar 71,05 dari tahun 2020 sebesar 70,58.

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Sasaran : Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Strategis 1**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase PPKS (%)	11,70	11,70	100%	10,76
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			100%	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis tercapai sebesar 100% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 1 buah yaitu persentase PPKS. Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Sosial dengan dukungan dari berbagai dinas teknis yaitu Dinas koperasi dan usaha mikro untuk program kegiatan pengembangan wirausaha, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Dinas Sosial di tahun 2021 fokus pada memulihkan kondisi masyarakat terdampak covid 19. Jumlah DTKS yang meningkat akibat pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan masa PPKM yang terus diperpanjang sehingga menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan, yaitu dari 383.754 jiwa (pada tahun 2020) menjadi 562.121 jiwa (pada tahun 2021). Maka, Dinas Sosial sudah melakukan berbagai program unggulan antara lain perlindungan dan jaminan sosial dengan memproduksi 4.115 paket makanan untuk kebutuhan dasar karantina, isoman dan pengungsi.

Program lain adalah fasilitasi dan pelaksanaan verval PBIJK sejumlah 450.246 KPM, yang terdiri dari: PBIN sejumlah 387.793 KPM; PBID Provinsi sejumlah 17.180 KPM; dan PBI Daerah sejumlah 45.273 KPM, serta fasilitasi Program Keluarga Harapan yang dibiayai melalui APBN sejumlah 47.944 KPM. Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin, meliputi fsilitasi dan pelaksanaan verval DTKS calon penerima bantuan program kesejahteraan sosial sejumlah 562.121 KPM, penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, yaitu : Program Sembako sejumlah 67.000 KPM; Program Sembako PPKM sejumlah 11.870 KPM; JPS Prop. Jatim sejumlah 2.500 KPM; serta BANSOSDA sejumlah 8.000 KPM. Indikator kinerja Dinas Sosial Sarana sosial, yaitu panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti) terealisir sebesar 100%, Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terealisir 100% dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terealisir 317%. Program dan kegiatan pendukung sasaran strategis adalah:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Sosial	5	5	13.071.800.864	11.122.670.675	85,09%

Pencapaian kinerja sasaran ini oleh berbagai inovasi program untuk meningkatkan kualitas layanan dengan menerapkan berbagai sistem antara lain aplikasi E-PBI untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK, mengembangkan Shelter/ Rumah Singgah Sementara untuk PMKS/PPKS, dan KUD (Kelompok Usaha Disabilitas) melalui ragam kegiatan ekonomi kreatif. Hasil kinerja menunjukkan bahwa persentase penduduk Kabupaten Blitar yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami selama 5 tahun, 2015 - 2019 terus mengalami penurunan secara moderat rata-rata 0,43% per tahun di mana tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 9,97% dan terus menurun dan pada tahun 2019 tinggal 8,94% dengan rata-rata angka kemiskinan 9,66%. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 akibat resesi ekonomi dunia, kondisi ekonomi daerah turun sehingga telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Akibatnya, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Blitar meningkat sebesar 0,39% menjadi 9,83% tahun 2020 atau sekitar 108.550 jiwa dan pada tahun 2021 kembali naik 0,32% menjadi 9,65% atau sekitar 112.650 jiwa. Namun demikian, angka kemiskinan Kabupaten Blitar masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,59% dan Nasional sebesar 9,71%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini.

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Data kependudukan, khususnya penduduk miskin, bersifat sangat dinamis, sehingga updating data secara berkala untuk penyediaan data kebijakan yang bersifat *real time* masih belum optimal.
2. Pelaksanaan program keluarga harapan, mestinya kalau sudah keluarga tersebut sudah mampu mandiri secara ekonomi, maka berhenti menjadi penerima manfaat. Akan tetapi *mindset* masyarakat menganggap bantuan yang diberikan pemerintah sebagai rejeki, sehingga pantang untuk ditolak meskipun sudah mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri. Sebagai akibatnya data PKH sulit sekali berkurang meskipun sudah dibantu dalam kurun waktu beberapa tahun.

3. Terbatasnya kegiatan fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan ODK agar mampu memenuhi fungsi sosialnya (pangan, papan, pendidikan, kesehatan).
4. Masih adanya beberapa panti anak dan lansia yang belum memiliki surat legalitas serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh pengurus panti menyebabkan pengelolaan panti anak dan lansia berjalan dengan kurang profesional.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Melakukan inovasi berupa *software aplikasi system* untuk mempercepat pelaksanaan pemutakhiran data secara on-line, terhubung langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga memangkas proses panjang pengiriman data. Sistem tersebut antara lain aplikasi E-PBI yang bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK; membangun Rumah Singgah yang berfungsi sebagai *shelter* untuk PMKS/PPKS atau penampungan sementara bagi orang terlantar dan anak jalanan hasil operasi gabungan instansi terkait; dan pengoptimalan KUD (Kelompok Usaha Disabilitas) sebagai lembaga pelatihan bagi ODK (Orang Dengan Kecacatan) agar memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk yang bernilai jual.
2. Sosialisasi dan upaya penyadaran penerima bantuan PKH melalui pendekatan agama dan sosial lainnya. Kesadaran individu ditingkatkan agar tidak terus merasa miskin dan tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Aneka macam pelatihan dan bantuan modal juga dilakukan agar masyarakat fakir miskin memiliki semangat untuk bekerja sehingga lebih berdaya, mampu keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, tahun 2020, setiap 6 tahun sekali harus ada perubahan KPM PKH – menjadi PKH Graduasi sehingga pada akhirnya PKM PKH yang kondisinya sudah lebih mampu otomatis akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
3. Melakukan intensifikasi berbagai pelatihan ketreampilan kepada disabilitas dan ODK agar mampu menghasilkan karya yang bernilai ekonomis sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Hasilnya produk dikelola oleh wadah organisasi khusus yang secara spesifik mengelola ini. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terciptanya manfaat ekonomi dari aktivitas ODK. Kemudian, dibuatkan wadah khusus, organisasi tersendiri yang secara spesifik mengelola pelatihan ODK yang masih berpotensi untuk

dikembangkan. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terjadinya transaksi keuangan.

4. Peningkatan pelatihan kepada pengurus panti agar memiliki keterampilan yang lebih profesional mengelola panti dan mampu terakreditasi. Bantuan permakanan dan uang saku juga diberikan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak dan lansia penghuni panti sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya lebih baik.
5. Sosialisasi dan pelatihan kepada satu operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang berhak mendapatkan bantuan, terhadap tenaga operator dari 248 desa/kelurahan dan memantau proses verifikasi dan validasi data oleh petugas di desa. Sosialisasi ke kepala desa/kelurahan ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemutakhiran basis data keluarga fakir miskin, serta peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi petugas-petugas lapangan yang mengalami kesulitan dalam proses input data di lapangan. Hasil laporan ini kemudian dilakukan dientry secara integrasi ke dalam aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial, hingga data kemiskinan menjadi lebih valid.

**Sasaran : Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Strategis 2 Toleransi, Solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesalehan Sosial (indeks)	80	81,74	102,19%	90
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			102,19%	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis tercapai sebesar 102,19% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 1 buah yaitu Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dukungan dari berbagai Badan Kesatuan Bangsa untuk stabilitas sosial masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja untuk ketentraman dan ketertiban dan Kecamatan sebagai koordinator wilayah untuk memfasilitasi kebijakan trantib di wilayah.

Evaluasi Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Konsultan yaitu Stats me dari Surabaya atas ijin dan asesment oleh Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur sebagai pemilik paten Indeks

Pengukuran. Penelitian dilakukan pada 22 kecamatan dengan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA) dan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengolah data interval dari 459 responden di 22 kecamatan. IKS disusun dengan menggunakan 4 variabel dengan masing-masing nilai variabel yaitu variabel kerjasama 79,69 poin, solidaritas sosial 80,23 poin, toleransi 89,19 poin dan ketertiban umum sebesar 77,87 poin. Hasil analisis akhir menunjukkan angka Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 81,74 poin atau sangat tinggi. Kesalehan masyarakat Kabupaten Blitar ini terjadi secara merata ke seluruh wilayah daerah dengan nilai IKS masyarakat perdesaan sebesar 82,14 poin atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan sebesar 81,52 poin.

Keberhasilan membangun kesalehan sosial tidak lepas dari dukungan berbagai perangkat daerah antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan. Badan Kesatuan Bangsa memberikan dukungan terhadap melalui 4 program, yaitu Penguanan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan berbagai kegiatan antara lain Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara bersama para pelajar dan masyarakat umum. Program Ketahanan sosial dan ekonomi melalui fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah bersama Forum Kerukunan Umat (FKUB) dan P4GN di Kabupaten Blitar. Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penjaga ketentraman dan ketertiban juga memberikan dukungan pencapaian sasaran strategis melalui intensifikasi koordinasi dan operasi yustitia Yustisi dan Non Yustisi dengan melibatkan OPD terkait (Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Kecamatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, TNI (KODIM 0808 dan CPM), Polresta dan Polres. Patroli rutin untuk pengamanan dan penertiban sebanyak 316 kali dan penanganan demo masyarakat sebanyak 9 kali. Terkait dengan manajemen pemadam kebakaran, Satpol PP juga melaksanakan kegiatan penanggulangan dan antisipasi kebakaran personil di puskemas dan masyarakat sekitar ke 20 pasar tradisional untuk mendeteksi aliran listrik yang rawan terjadi arus pendek. Jangkauan wilayah yang luas yaitu 22 kecamatan dan

armada pemadam kebakaran sangat terbatas yaitu 2 unit mobil pemadam, maka dilakukan koordinasi aktif dan kerjasama dengan Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar. Sehingga cakupan penanganan kebakaran bisa 100% berupa 26 kejadian, penanganan *animal rescue* 62 kejadian, evakuasi dan pencairan korban laka air 8 kejadian dan kejadian lain 8 kejadian. Sedangkan, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 60 menit karena jangkauan wilayah yang luas meliputi 22 kecamatan dengan keterbatasan armada kebakaran dan personil pemadam kebakaran terlatih. Capaian kinerja Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan kinerja Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban dapat dicapai 100%. Program dan kegiatan pendukung sasaran strategis masing-masing perangkat daerah adalah:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	585.212.000	582.455.346	99,53%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	2.302.070.382	2.221.816.995	96,51%
Satuan Polisi Pamong Praja	14	38	4.624.514.350	4.209.493.725	91,03%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>			<b>7.511.796.732</b>	<b>7.013.766.066</b>	<b>93,37%</b>

Pencapaian kinerja sasaran ini oleh berbagai inovasi program. Bakesbangpol fokus pada menjaga stabilitas sosial di masa pandemi dan menjaga situasi politik pada masa transisi pasca Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. Seluruh potensi organisasi difokuskan dalam menjaga stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kab. Blitar sehingga dalam pelaksanaan inovasi difokuskan untuk pengembangan inovasi yang sudah ada yaitu Peta Mitigasi Konflik. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Tingkat kesadaran generasi umur 6 - 25 tahun terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan masih kurang, sehingga perlu dilakukan kegiatan bagi anak-anak generasi muda.
2. Kurangnya fasilitasi terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3. Masih tingginya heterogenitas dan semangat primordialisme masyarakat sehingga rentan terjadi benturan.
4. Kurangnya akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan hibah partai politik.

5. Mulai berkembangnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga mulai menjadi tambahan potensi gangguan stabilitas sosial.
6. Jumlah personil Satpol PP yang masih kurang untuk menangani kompleksitas dan banyaknya permasalahan lingkungan dan penegakan Perda di lapangan dan luasnya wilayah operasi. Jumlah personil Satpol PP saat ini hanya 93 personil dimana jumlah ini jauh di bawah ideal yaitu sebanyak 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).
7. Sarana dan prasarana, terutama mobil dinas, mobil pemadam kebakaran dan alat komunikasi anggota, seragam linmas yang bertugas di Linmas, masih sangat kurang. Sarana saat ini hanya mobil patroli 6 unit, kendaraan dinas mobil 3 (tiga) unit, motor 28 unit, dan mobil pemadam kebakaran hanya 2 unit.
8. Motivasi masyarakat menjadi kader Linmas yang masih rendah dan kaderisasi yang belum berjalan optimal.
9. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi acuan dan arah pembangunan Kabupaten Blitar yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, belum ada.
10. Mulai munculnya fenomena anomali iklim, perubahan hidrometeorologis, yang terjadi menyebabkan perubahan peta rawan bencana di Kabupaten Blitar. Wilayah pesisir pantai meningkat skala potensi ancaman bencana baik bencana kekeringan yang berkepanjangan dan ancaman badai. Hal ini berakibat peta rencana penanganan bencana kekeringan berubah dan semakin luas.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Mengintensifkan elaksanaan kegiatan PHBN, Sosialisasi pendidikan pancasila kepada pemilih pemula dan perempuan, fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan kegiatan deteksi dini konflik pembauran.
2. Mengoptimalkan peran forum-forum (FKDM, KOMINDA, FKUB dan FPK) yang ada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan untuk mengantisipasi potensi timbulnya gejolak di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.
3. Meningkatkan kegiatan FKUB dan FPK ke arah pemberdayaan organisasi yang dapat mengubah perbedaan menjadi keunggulan kompetitif.
4. Mengintensifkan berbagai kegiatan fasilitasi sosialisasi, workshop dan konsultasi pada partai politik dalam pengelolaan administrasi bantuan keuangan.
5. Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
6. Mengefektifkan peran Tim Koordinasi dan Pokja P4GN di Kabupaten Blitar.

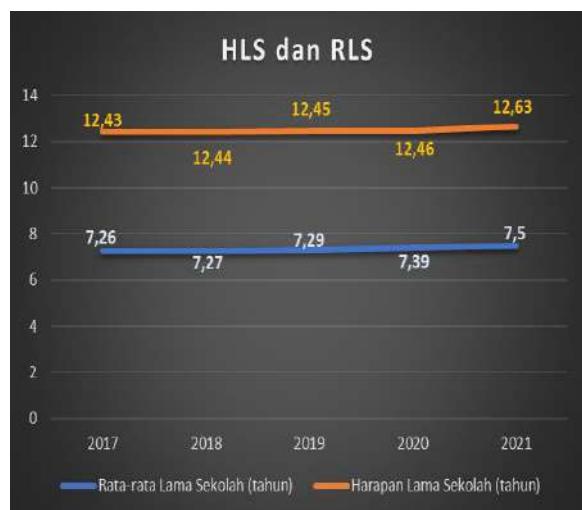
7. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemilu di 6 dapil, memberikan dukungan kelancaran logistik pemilu, serta monitoring KAMTIBAS di daerah.
8. Pengajuan tambahan jumlah SDM Satpol PP dan peningkatan kualitas SDM PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Meningkatkan intensitas pembinaan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sebagai bagian dari upaya pencegahan, misalnya pembinaan terhadap pelaku usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna, Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah bagi pelaku usaha di tempat (penambang pasir wilayah Kabupaten Blitar) dan usaha yang terindikasi mencemari lingkungan.
10. Pengajuan tambahan prasarana pelaksanaan ketentraman dan ketertiban antara lain pos pemadam kebakaran di setiap WMK, mobil damkar, mobil patroli.
11. Intensifikasi penyuluhan atau sosialisasi, baik melalui media masa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan perda, tanggap bencana, maupun upaya pemberantasan narkoba dan miras.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Strategis 3**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Harapan Lama Sekolah (HLS) - tahun	12,46	12,63	101,36%	13,19
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) – tahun	7,39	7,50	101,49%	7,78
Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,52	73,61	100,12%	74,54
<b>Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis</b>				100,99%

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja rata-rata sasaran strategis sebesar 100,99% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 3 buah yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Usia Harapan Hidup (tahun). Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan dukung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kesehatan. Capaian kinerja indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan bahkan di atas rata-rata Provinsi UHH Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan dan pola hidup masyarakat Kabupaten Blitar sudah sangat baik. Angka Rata-Rata Lama sekolah menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 0,06 tahun per tahun atau

0,86% per tahun. Rata-rata lama sekolah terealisir 7,5 tahun artinya, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Blitar adalah setara dengan SMP kelas 2. Sedangkan, untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) naik sebesar 0,05 tahun per tahun atau 0,40% per tahun. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan taraf pendidikan masyarakat. Meskipun rata-rata lama sekolah hanya sampai SMP kelas 2, tetapi harapan lama sekolah masyarakat melebihi rata-rata sekolahnya, yaitu 12,63 tahun atau setara dengan diploma 2. Dari grafik diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
2017	12,43	7,26
2018	12,44	7,27
2019	12,45	7,29
2020	12,46	7,39
2021	12,63	7,5

Berbagai strategi kebijakan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, antara lain: 1) melakukan Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), yaitu agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali ke sekolah sehingga menurunkan angka putus sekolah, 2) pembangunan SMP Negeri 03 Garum bertujuan untuk menampung siswa-siswi yang berada di lingkungan sekitar wilayah tersebut agar bisa bersekolah di SMP Negeri sehubungan dengan diterapkannya kebijakan zonasi; 3) membangun sistem PPDB Online berbasis database mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, hingga hasil pengumuman; dan 4) penyelenggaran Sekolah Inklusi tahun 2021 telah diawali dengan adanya Sosialisasi, Bimtek dan dilanjutkan dengan adanya pendampingan pada sekolah yang telah mulai menyelenggarakan Sekolah Inklusi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip memberikan dukungan dengan berbagai program antara lain pembinaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Jumlah lembaga yang sesuai standar nasional sebanyak 31 lembaga jauh di atas target yang ditetapkan.

Untuk jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang ditingkatkan kapasitasnya, juga terealisir 32 tenaga yang jauh di atas target. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari target 35,3 telah tercapai sebesar 36,6 dengan variabel penghitungannya melalui beberapa komponen antara lain tingkat durasi membaca ( TDM ), Tingkat Frekuensi membaca ( TFM ) dan Tingkat Jumlah Buku yang dibaca ( TJB ). Demikian juga, untuk Persentase OPD dengan nilai Pengawasan Kearsipan Internal berkategori C dari target 3,8 persen telah tercapai sebesar target yaitu 3,8 persen ini dilakukan dengan menilai sejumlah 52 unit karsipan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar dimana dari 52 Unit Karsipan ditargetkan ada 2 Unit Karsipan berkategori C dan tercapai 2 Unit Karsipan.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terutama Pandemi COVID-19, meningkatkan Promosi Kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 menuju tatanan baru, dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan di Blitar terutama di wilayah Barat. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sasaran strategis tersebut antara lain meningkatkan luasan akses sarana kesehatan masyarakat. Program peningkatan kualitas sumber daya kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program kegiatan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Dengan keterbatasan tenaga kesehatan, beberapa target kinerja dapat dicapai secara maksimal.

Berbagai capaian kinerja urusan kesehatan antara lain angka kematian bayi per 1.000 kelahiran sebanyak 6,84 kejadian dan angka ini mencapai target yaitu 9,03 kejadian per 1.000 kelahiran. Untuk prevalensi gizi terus mengalami penurunan, dari target yang ditetapkan sebesar angka 0,124 terealisir 0,17 poin. Sedangkan untuk angka kematian ibu melahirkan (AKI) dari target 98 per 100.000 kelahiran terealisir 122,26 atau masih sedikit belum tercapai. Capaian kinerja kesehatan secara umum Kabupaten Blitar dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakatnya. UHH Kabupaten Blitar terus meningkat selama 5 tahun terakhir secara rata-rata 0,155 tahun, dimana tahun



Blitar dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakatnya. UHH Kabupaten Blitar terus meningkat selama 5 tahun terakhir secara rata-rata 0,155 tahun, dimana tahun

2017 sebesar 72,99 tahun menjadi sebesar 73,61 pada akhir tahun 2021. Dari grafik diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tahun	Usia Harapan Hidup (th)	Usia Harapan Hidup Jatim (th)
2017	72,99	70,6
2018	73,16	70,97
2019	73,39	71,16
2020	73,52	71,3
2021	73,61	71,38

Capaian ini melebihi usia harapan hidup rata-rata Provinsi Jawa Timur. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pola hidup sehat dan daya dukung lingkungan fisik di Kabupaten Blitar sangat besar bagi ekosistem yang sehat. Pelayanan kesehatan di tingkat strata 1 juga terus ditingkatkan, rasio posyandu per satuan balita membaik menjadi 1:46 balita, Rasio dokter per satuan penduduk membaik menjadi 1:5.228, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 28,88%. Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin di Tahun 2021 terealisir sebesar 11.56% dari target sebesar 12%. Data menunjukkan bahwa jumlah rujukan masyarakat miskin ke Rumah Sakit sejumlah 1.256 jiwa sedangkan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Blitar Tahun 2021 berdasarkan Data pada Kabupaten Blitar Dalam Angka adalah 9,65% dari penduduk atau sebesar 112.650 jiwa.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) memberikan dukungan melalui 4 program peningkatan kualitas keluarga, program pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Program peningkatan keluarga pada tahun anggaran 2021 ini mampu tercapai kinerja sebesar 49,20% keluarga yang memenuhi kriteria kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak atau terdapat 201.470 keluarga dari 409.409 keluarga di Kabupaten Blitar selama tahun 2021. Selain itu, terdapat 92 keluarga yang telah mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, pengaturan ekonomi keluarga yang juga pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar telah mengembangkan atau membina lembaga

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten yang dalam hal ini lembaga tersebut adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Terdapat 22 keluarga yang telah mendapatkan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang dilaksanakan selama tahun 2021. Berbagai program ini mendukung pencapaian kinerja pemberdayaan gender (IDG) dalam 5 tahun terakhir rata-rata naik 1,06 poin, dan tahun 2020 tercapai angka 80,32 poin. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Perangkat daerah beserta program dan kegiatan pendukung sasaran strategis ini adalah:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pendidikan	5	17	162.392.448.052	167.533.439.806	103,17%
Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	11	3.932.752.795	3.823.500.772	97,22%
Dinas Kesehatan	7	62	205.263.338.923	178.946.060.576	87,18%
RSUD Ngudi Waluyo	3	4	124.960.322.359	106.064.538.816	84,88%
RSUD Srengat	3	4	67.668.845.900	48.672.773.952	71,93%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	14	862.539.335	486.613.320	56,42%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>			<b>565.080.247.364</b>	<b>505.526.927.242</b>	<b>89,46%</b>

Pencapaian kinerja sasaran ini oleh beberapa inovasi program dari berbagai perangkat daerah. Dinas Kesehatan dan RSUD mengembangkan DAR DER DOR (Pendaftaran Digital Terjadwal *Door To Door*) yang merupakan penggabungan dari Aplikasi sistem SMS Gateway dan Si Anoman (Sistem Antrian Nomor Mandiri) dan BLITAR SERASI (Bahagia, Berkualitas dengan Strategi terapi self healing, Rom dan musik di ruang Stroke Center) merupakan terapi *self-healing*, ROM dan Musik merupakan terapi non farmakologis sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas hidup pada pasien stroke yang bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik antara perawat dan keluarga. Inovasi di bidang pendidikan dan perpustakaan antara lain Agenda Perpustakaan Edukatif Rekreatif yang disingkat "BAPER", Literasi pagi dan siang , D'KUK dari kami untuk kita (literasi berbasis inklusi social), BISIK (bincang asyik), PETIS (program edukasi transformasi inklusi sosial).

Prestasi bidang pendidikan yang berhasil diraih antara lain Juara I (Medali Emas) Tingkat Nasional "Apresiasi Karya Terbaik Video Kreativitas Seni Peserta Didik" GEBYAR GEMA PRATIWI "Kreativitas Seni Peserta Didik yang Berkarakter" UPT SD Negeri Bumirejo 03 Kec. Kesamben atas nama Fajar Tri Azizah, Juara Favorit I Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Mapel Matematika UPT SD Negeri Banggle 02 Kec. Kanigoro atas nama Ani Kholidatul Khoir, dan Juara Harapan II Tingkat Nasional Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Seni Tari UPT atas nama Sandiaga Satria Abimanyu, Dani Zaky Yuddin dan Ilham Bagus Firmansyah. Di Bidang Perpustakaan capaian prestasi nasional yaitu Juara I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Jawa Timur adalah Juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah Tk Provinsi Jawa Timur. Dan, untuk bidang kesehatan prestasi dicapai yaitu Penghargaan STBM Berkelanjutan Kabupaten/Kota Stop BABS/ODF 100%, desa Purwokerto dan Penghargaan Kepala Desa/Lurah Terbaik Kabupaten/Kota SBS /ODF 100% dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan Penghargaan Natural Leader Terbaik dan Penghargaan Kabupaten ODF Dari Gubernur Jawa Timur.

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan pendidikan, khususnya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan

kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

3. Perpustakaan masih terbatas memiliki tenaga fungsional pustakawan yang memiliki keahlian dan kompetensi mengelola perpustakaan, sehingga Perpustakaan umum daerah yang belum bisa diusulkan terakreditasi.
4. Infrastruktur penyelenggaraan pelayanan perpustakaan secara online dan alih media buku elektronik masih sangat berbatas, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai bahan bacaan dan pelayanan lebih lama dan lambat.
5. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan desa masih rendah.
6. Kesadaran masyarakat terhadap Pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. Bahkan di beberapa desa, masih ada warga yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan adanya kontra indikasi bahwa anak akan menderita penyakit auto imun, dll.
7. Kesadaran dan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan dan dampaknya terhadap risiko bagi orang lain, masih rendah.
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular karena faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan pekerjaan;
9. Belum semua desa memiliki Posbindu PTM dan Posbindu KIT, dan Belum adanya dukungan anggaran Desa untuk pengadaan BHP penunjang skrining PTM;
10. Tingkat pendidikan, pemahaman serta status sosial ekonomi keluarga penderita masih kurang, dengan menganggap obat dari Puskesmas kurang berkhasiat dan membeli obat sendiri di apotek serta memilih pengobatan alternatif, namun tidak dilakukan secara rutin dan terus menerus. Sedangkan penderita ODGJ rentan untuk kambuh kembali ketika tidak mengkonsumsi obat secara rutin;
11. Masih minimnya dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di IGD dan ICU sehingga berdampak pada masih tingginya angka kematian kasar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Intensifikasi sosialisasi dan pemberdayaan komite sekolah melalui fasilitasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar terus ditingkatkan.
2. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
3. Peningkatan kapasitas tenaga pustakawan dan usulan formasi tenaga fungsional pustakawan dan perpustakaan daerah segera diusulkan akreditasi.

4. Peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dalam pengembangan layanan online dan akses sumber bacaan digital dilakukan secara bertahap.
5. Sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat desa dalam pengembangan perpustakaan desa (taman bacaan masyarakat) terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
6. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan disiplin penegakan protokol kesehatan yang dimulai dari penguatan penegakan aturan sampai dengan penanganan rujukan covid-19.
8. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
9. Penguatan rujukan berjenjang dan sosialisasi masyarakat untuk mengaktifkan PSC.
10. Perbaikan mutu pelayanan life saving di IGD dan melaksanakan pelatihan ACLS bagi seluruh tenaga medis agar memahami penanganan kegawatdaruratan pada jantung.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kepemudaan  
Strategis 4**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Pemuda	54,44	51,83	95,21%	58,37
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>95,21%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 95,21% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 1 buah yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. IPP dibentuk dengan 4 domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, dan partisipasi dan kepemimpinan. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Blitar memiliki skor sebesar 51,83 yang masuk kategori sedang. Capaian ini memerlukan upaya pembangunan pemuda di Kabupaten Blitar dengan langkah-langkah besar untuk meningkatkannya.

Dinamika Capaian setiap Domain pembentuk IPP Kabupaten Blitar menunjukkan bila terdapat tiga domain yang berperan signifikan dalam mendorong nilai IPP Kabupaten Blitar, yakni Domain Pendidikan, Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Domain

Lapangan dan Kesempatan Kerja. Namun demikian, capaian domain pendidikan menunjukkan capaian yang paling krusial karena nilainya yang berada dibawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional. selain itu juga terdapat domain Gender dan Diskriminasi yang capaiannya cukup mengkhawatirkan. Hasil ini menjadi sinyal bagi pemerintah Kabupaten Blitar bila upaya pembangunan pemuda secara khusus dapat difokuskan untuk peningkatan pada kedua domain tersebut.

Dalam bidang pelibatan pemuda dalam pengembangan pendidikan adalah melalui partisipasi dalam olah raga prestasi. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga, telah mendukung pencapaian prestasi olah raga siswa di dalam kompetisi regional maupun nasional tahun 2021. Selain itu, berbagai bimbingan teknis dan kompetisi pengembangan literasi budaya baca juga melibatkan para pemuda. Secara umum, pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Kabupaten Blitar tercapai dengan baik dengan dukungan inovasi pelayanan yang terus meningkat. Perangkat daerah beserta program dan kegiatan pendukung sasaran strategis ini adalah:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3	6	1.421.368.750	1.166.790.399	82,90%
<b>Serapan Anggaran</b>			<b>1.421.368.750</b>	<b>1.166.790.399</b>	<b>82,90%</b>

#### **Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Sampai ke Strategis 5 Desa**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,94	81,08	100,17%	89,24
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>100,17%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100,17% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 1 buah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Leading sektor kegiatan ini adalah Bagian Organisasi yang melakukan survei kepuasan dengan hasil IKM sebesar 81,08 poin. Adapun perangkat daerah yang dilakukan survei adalah Sekretaris Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo, Dinas Penanaman Modal dan

PTSP, dan Dinas Perhubungan. Hasil detail survai kepuasan pada 6 perangkat daerah tersaji sebagai berikut di bawah ini:

Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,17	B	Baik
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	79,31	B	Baik
Dinas Kesehatan (Puskesmas)	81,61	B	Baik
RSUD Ngudi Waluyo	78,76	B	Baik
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,71	B	Baik
Dinas Perhubungan	84,00	B	Baik
<b>Rata-rata IKM</b>	<b>81,08</b>		Baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan kenaikan secara moderat selama 5 tahun terakhir (2017-2021). Survei dilakukan terhadap perangkat daerah sasaran yang setiap tahun berganti-ganti. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan memakai 9 variabel pengukuran yang mengikuti variabel standar pelayanan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh 4 program yang saling terkait yaitu 1) program pendaftaran kependudukan, 2) program pencatatan sipil, 3) program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan 4) program pengelolaan profil kependudukan. Capaian kinerja program ini tercapai rata-rata di atas 100% atau sangat berhasil.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan seluruh Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan dan dengan tanda tangan elektronik Kepala Dinas. Saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) jaringan SIAK untuk mendukung aplikasi SIAK agar berjalan dengan baik. Jumlah itu



ada di 22 (dua puluh dua) kecamatan dan 1 (satu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan pemanfaatan data oleh pihak lain yang dimaksud disini adalah pemanfaatan data oleh pihak lain melalui perjanjian kerjasama, dari target 5 (lima) tercapai tercapai 8 (delapan) OPD, kenaikan 60%, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pendapatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Nudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, Dinas Koperasi dan UM. Sedangkan Dinas DPPKBP3A telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data namun untuk tahun 2021 belum diperbaharui. Diharapkan lebih banyak OPD yang melakukan perjanjian kerjasama. Untuk inovasi pelayanan agar mendekatkan dan memudahkan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat telah dilakukan berbagai inovasi. Inovasi tersebut dapat berjalan optimal seluruhnya sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

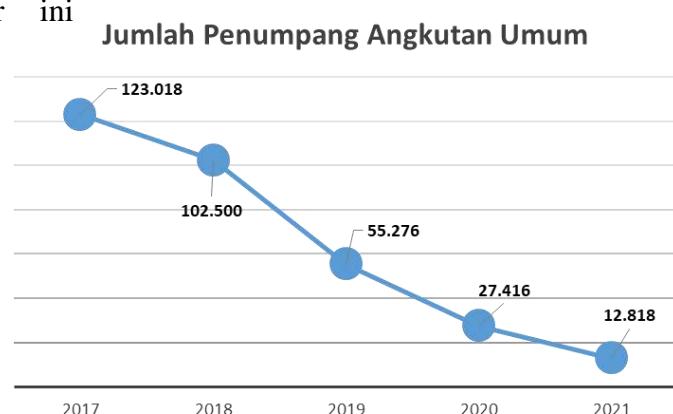
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan secara *online* melalui *website* dan aplikasi, sehingga pemohon melalui komputer/*smartphone* bisa melakukannya dari lokasi mana saja, cukup dengan melakukan pendaftaran dan *upload* berkas persyaratan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ikut mendorong terwujudnya slogan nasional “Dispenduk Go Digital” yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Beberapa inovasi aplikasi sistem yang dikembangkan antara lain aplikasi E-SIAP, Anjungan Tutul Mandiri (ATM), Akta Kelahiran terbit sebelum Sepasar (AL ASAR), Akta Kematian terbit sebelum Pemakaman (AKAM), Akta Perkawinan terbit setelah Ikrar (KAWIN TERBAIK), Pelayanan Keliling Jemput Bola (JEBOL), InovaSI Jemput bola penduduk RentAN Isa Jujug Omah (Si Jaran Ijo), WA Centre, dan Drive Thru Pelayanan KTP El. Kinerja pemenuhan dokumen kependudukan terus menunjukkan peningkatan prosentase selama 5 tahun terakhir.

Hampir seluruh program dan kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Blitar masih bisa dilaksanakan dan memenuhi target sesuai yang ditetapkan. Pada Pelayanan Penanaman Modal jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin dari target 7.500 pelaku usaha ternyata pelaku usaha yang mengajukan izin usaha mencapai 9732 pelaku usaha. Tetapi capaian tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah pusat terhadap pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yang syarat utamanya adalah harus memiliki izin usaha. Hal ini menyebabkan izin usaha yang terbit mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari target 1.500 izin terbit terealisasi 13.333 izin. Pada Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan monev dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi. Jumlah realisasi investasi dari target 10.700 Miliar telah mencapai 9.600 Miliar masih sampai dengan triwulan III karena pada aplikasi LKPM untuk triwulan IV belum keluar datanya dan belum dapat diunduh. Selain itu pada kegiatan monev dan pembinaan pada perusahaan sempat terkendala pelaksanaannya karena adanya aturan PPKM dari pemerintah pusat untuk memutus rantai penyebaran covid-19 sehingga DPMPTSP belum bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja ini dilakukan melalui berbagai inovasi pelayanan investasi yang dilakukan oleh dinas, antara lain: 1) LOSS BERSAMA MANTAN (Layanan OSS bersama ANSOR dan FATAYAT NU). Melalui LOSS BERSAMA MANTAN masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan perizinan dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan ANSOR dan FATAYAT NU yang gratis tanpa dipungut biaya; 2) LOSS DOL (Layanan OSS di Desa Secara Online) kemudahan pelayanan masyarakat dan pendampingan pelayanan perizinan oleh petugas di Desa yang gratis tanpa dipungut biaya; dan 3) Ini Baru Joss Banget Mas yaitu Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan ijin usaha hanya dirumah saja meskipun pada malam hari. Proses perizinan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Pemohon izin mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan karena adanya BLT dari pemerintah pusat yang mempersyaratkan adanya legalitas usaha. Prestasi yang diraih adalah Nomine Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam Anugerah Layanan Investasi 2021 oleh Kementerian Investasi.

Pelayanan umum di Dinas Perhubungan menunjukkan tren yang terus lebih baik. Pelayanan jumlah penumpang angkutan umum misalnya, dari target sebesar 131.073 orang dan 15.410 orang. Indikator ini menunjukkan gambaran jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun. Capaian indikator pertama ini tidak sesuai target yang diproyeksikan di tahun 2021 dan hanya mampu mencapai 68.731 orang dan 12.818 orang.



Pergerakan jumlah arus penumpang angkutan umum digambarkan dalam grafik di samping. Grafik di atas menunjukkan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum yang bergerak konsisten menurun. Pada tahun 2017 jumlah penumpang angkutan umum mencapai 123.018 orang dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kondisi akhir tahun 2021 jumlah penumpang angkutan umum sebesar 68.731 orang (mengalami penurunan 58%). Dari grafik di atas dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penumpang Angkutan Umum
2017	123.018
2018	102.500
2019	55.276
2020	27.416
2021	12.818

Adanya trend penurunan jumlah penumpang angkutan umum setiap tahunnya diantaranya disebabkan oleh: 1) Semakin mudahnya masyarakat dalam memiliki kendaraan pribadi yang mengakibatkan banyak penggunaan angkutan umum yang beralih ke angkutan pribadi yang dianggap lebih efektif (pada keterjangkauan wilayah/tempat tujuan) dan efisien (disegi waktu dan biaya) dalam penggunaannya; Adanya layanan jasa angkutan baru berupa layanan transportasi berbasis aplikasi/online yang sudah mulai masuk dan berkembang di Kabupaten Blitar. Masyarakat lebih memilih menggunakan layanan jasa angkutan ini karena merasa lebih efektif dan efisien dibanding penggunaan angkutan umum; dan adanya pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum dan pemilihan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi akibat pandemi Covid-19.

Keberhasilan berbagai inovasi ini tidak lepas dari dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi *leading sector Smart City* Kabupaten Blitar. Regulasi yang menjadi dasar pengembangan adalah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2028 dan disusul dengan terbitnya menerbitkan 5 regulasi terkait *smart city*. Infrastruktur pendukung terus dibangun agar setiap perangkat daerah mampu memiliki dan mengembangkan aplikasi sistem digital dalam mempermudah pelayanan. Command center, Data center dan jaringan telah terintegrasi di kabupaten blitar yang mencapai total titik koneksi sebanyak 141 titik melalui fiber optik. Fasilitas Teleconference untuk menunjang kinerja di era industry 4.0

dibutuhkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Dalam pelayanan public, dibangun Layanan Mandiri Surat untuk mempermudah layanan masyarakat secara virtual di kantor desa. Pada tataran aplikasi program, dibangunnya satu dashboard smart city yang menyatukan seluruh aplikasi penunjang pilar smart city. Beberapa aplikasi baru dikembangkan tahun 2021 antara lain aplikasi SIK, e-tani, Aplikasi smart map, Aplikasi Sikanda, e-budgeting, Amazing Blitar. Aplikasi ini melengkapi jumlah aplikasi sistem yang ada hampir mencapai 30 sistem. Pada masa pandemi, sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/656/409.02/KPTS/2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Adminduk Calon Penerima Bansos Terdampak Covid-19, inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan kolaborasi antara Bidang Data dan Statistik dengan Bidang Informatika adalah membuat aplikasi Jaring Bansos.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika,. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagian Organisasi	1	3	1.041.734.043	1.026.229.600	98,51%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	8	60.925.000	49.300.000	80,92%
Dinas Kesehatan	1	4	3.387.294.750	3.231.632.500	95,40%
RSUD Ngudi Waluyo	1	3	2.365.300.000	2.240.987.200	94,74%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	11	4.670.070.190	4.293.984.143	91,95%
Dinas Perhubungan	2	15	13.589.065.355	12.810.575.943	94,27%
<b>Serapan Anggaran</b>			<b>25.114.389.338</b>	<b>23.652.709.386</b>	<b>94,18%</b>

Hambatan/Kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap standar pelayanan masih rendah, sehingga kontrol dan penilaian terhadap pelayanan publik perangkat daerah masih belum tinggi validitasnya.
2. Cakupan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan masih sangat kurang, beban kerja pegawai sangat tinggi dan akibatnya pelayanan tidak maksimal.
3. Sarana dan prasarana pelayanan di Dispendukcapil masih sangat kurang. Jumlah

pelayanan rata-rata perhari mencapai ±500 orang, kondisi ruang yang ada sangat kurang memadai. Ruang minimal loket penerimaan dan pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi, meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan tempat antrian. Tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang administrasi perkantoran. Fasilitas lainnya, ruang pertemuan, ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok.

4. Masih perlunya ditingkat *mind set* dan kompetensi pemberi layanan, dimana hampir semua proses perizinan sudah menggunakan aplikasi sistem online.
5. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan kompeten di bidang teknologi informasi masih sangat kurang.
6. Masih belum stabilnya pasokan internet ke OPD sehingga masih diterima beberapa keluhan mengenai internet.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat (Wajib Pajak) terkait regulasi Pajak Daerah di Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam pencapaian sasaran kinerja adalah:

1. Sosialisasi pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan dan evaluasi penerapan standar pelayanan di berbagai perangkat daerah.
2. Dilakukan usul penyesuaian sumber daya aparatur, dimana idealnya dibutuhkan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezzeting atau pemetaan kebutuhan aparatur, saat ini masih kurang 25 personil.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pelayanan untuk kompeten dan memiliki *mind set* melayani kepada masyarakat secara lebih baik.
4. Pengembangan berbagai aplikasi pelayanan publik harus terus dilakukan mengingat luas wilayah Kabupaten Blitar dan sebaran penduduk ke pelosok wilayah Blitar, yaitu memperluas dan mempercepat akses layanan dan menggunakan aplikasi sistem dan desentralisasi pelayanan ke kantor kecamatan.
5. Gudang arsip dokumen kependudukan telah diusulkan pembangunnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus digitalisasi (alih media) data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman. Manajemen arsip digital sangat penting dalam pengelolaan arsip kependudukan, sebab selain untuk menjaga keberlangsungan pengendalian kependudukan, juga agar mudah dalam penggunaan untuk tujuan pengawasan dan pengendalian data migrasi penduduk.
6. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan

desa dan kelompok masyarakat.

7. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
8. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
9. Merekrut dua orang tenaga programmer dan satu orang designer grafis untuk mendukung kinerja publikasi dan membuat aplikasi-aplikasi sederhana guna mempermudah dan mendukung kinerja OPD. Selanjutnya secara umum Dinas Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis, maupun kegiatan lain yang berpotensi menambah kemampuan sumberdaya aparatur OPD.
10. Kedepan akan dilakukan *backup* jaringan maupun assesment jaringan ke OPD-OPD untuk evaluasi permasalahan dan rekomendasi penyelesaian sehingga gangguan internet dapat diminimalisir. Selain itu, juga akan ditingkatkan kualitas infrastruktur jaringan melalui *fiber optic* sehingga komunikasi lebih lancar.
11. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha, aparat pemerintahan dan masyarakat mencakup seluruh kecamatan, serta monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar, dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

**Sasaran : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Strategis 6 Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai SAKIP	B	B	100,00%	A
Indeks SPBE	3,2	2,76	86,25%	4,1
Indeks Sistem Merit	135	99	73,33%	305
Persentase Desa Mandiri	4,55	4,55	100,00%	10
Indeks Inovasi Daerah	60,15	56,58	94,06%	75,15
<b>Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran Strategis</b>			90,73%	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja rata-rata sasaran strategis sebesar 90,73% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 5 buah yaitu Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Indeks Sistem Merit, Persentase Desa Mandiri, dan Indeks Inovasi

Daerah. Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir, Tahun 2017 nilai SAKIP sebesar 50,54 atau peringkat CC dan akhir tahun 2020 menjadi 68,47 poin atau nilai B. Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan (*refocusing*) yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan.

Inspektorat terus melakukan berbagai perbaikan kinerja pencapaian SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi melalui evaluasi secara rutin periodik. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah 61,81 atau kategori "B". Inspektorat melakukan penilaian capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) terhadap sebanyak 52 perangkat daerah pada tahun 2021 dengan hasil rata-rata sangat rendah, yaitu 18,38 poin. Nilai IRB tertinggi diraih Dinas Peternakan dan Perikanan skor 32,13 poin dan nilai IRB terendah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil skor 3,92 poin. Sedangkan, capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 adalah 69,13 poin. Hasil penilaian inspektorat terhadap nilai SAKIP terhadap 52 perangkat daerah dihasilkan rata-rata nilai 73,51 poin atau BB. Nilai tertinggi diraih oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan skor 89,85 poin dan terendah Kecamatan Wonotirto skor 57,99. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Nilai SAKIP
2016	50,54
2017	62,86
2018	67,76
2019	68,47
2020	68,47
2021	69,13

Untuk ZI yang diajukan tahun 2021 sebanyak 12 unit kerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 188/240/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas di Lingkungan Pemkab Blitar Tahun 2021. Inspektorat mulai menerapkan aplikasi e – audit berbasis website. Aplikasi ini memungkinkan obrik melakukan konfirmasi Naskah Hasil Temuan (NHP) melalui website sehingga mempersingkat waktu proses pengawasan.

Keberhasilan capaian SPBE sebesar 2,76 poin didukung oleh inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi *leading sector Smart City* Kabupaten Blitar. Regulasi yang menjadi dasar pengembangan adalah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2028 dan disusul dengan terbitnya menerbitkan 5 regulasi terkait *smart city*. Infrastruktur pendukung terus dibangun agar setiap perangkat daerah mampu memiliki dan mengembangkan aplikasi sistem digital dalam mempermudah pelayanan. Command center, Data center dan jaringan telah terintegrasi di kabupaten blitar yang mencapai total titik koneksi sebanyak 141 titik melalui fiber optik. Fasilitas Teleconference untuk menunjang kinerja di era industri 4.0 dibutuhkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Dalam pelayanan publik, dibangun Layanan Mandiri Surat untuk mempermudah layanan masyarakat secara virtual di kantor desa.

Beberapa inovasi aplikasi sistem pendukung SAKIP yang berhasil dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain: 1) E-Transparansi Anggaran dan Kinerja Layanan Publik merupakan dashboard aplikasi yang menampilkan laporan keuangan setiap tahun, laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban, PAD dan ringkasan APBD; 2) Mall Pelayanan Publik Desa, merupakan dashboard yang menampilkan aplikasi-aplikasi publik untuk masyarakat Kabupaten Blitar; 3) Command Center Desa, merupakan Dashboard yang menampilkan aplikasi untuk mengetahui hasil kinerja dan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan/keputusan; 4) E-Health merupakan Aplikasi pelayanan untuk pendaftaran pasien secara online dan pencarian isformasi terkait puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Blitar; 5) Public Service Center merupakan Penyatuan layanan pengaduan satu portal dengan branding “Wadul Make”; dan 6) Jeng Risda (*Reliable Intelligent System Data Assistant*) merupakan Aplikasi asisten virtual yang dapat menjawab kebutuhan pengguna data secara tepat, cepat dan efisien, dengan total seluruh aplikasi sistem hampir mencapai 30 aplikasi sistem.

Sistem Merit menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021. ASN dapat menggunakan sistem ini sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. Masyarakat, dapat menggunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Peningkatan sistem merit dilakukan dengan meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) mencakup 4 Dimensi, yaitu Dimensi Disiplin (5%), Dimensi Kualifikasi (25%), Dimensi Kinerja (30%), dan Dimensi Kompetensi (40%). Adapun nilai pengkategorian IP-ASN terbagi dalam kategori: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60). Berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 oleh BKN, nilai IP-ASN Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 59,26 atau menurun 0,49 dibanding tahun 2020. Penurunan nilai IP ASN ini disebabkan ada beberapa dimensi yang mengalami penurunan.

Terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat berbagai capaian kinerja berdasarkan 7 indikator kinerja kunci (IKK). IKK tersebut antara lain, 1) jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes sebanyak 220 atau sudah memenuhi target; 2) jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 220 atau sudah memenuhi target, 3) jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar sebanyak 10 atau sudah memenuhi target, 4) jumlah Desa Mandiri 10 Desa (4,54%) dari 220 Desa Meningkat dari 9 desa tahun sebelumnya; 5) jumlah Desa yang Berkembang turun dari 72 menjadi 57 desa; 6) jumlah desa tertinggal 0; dan 7) jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berkembang sebanyak 120 BUM Desa.

Capaian kinerja Inovasi daerah *leading sector*nya adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah anggota tim driver dan Gugus tugas Kabupaten Layak Anak, berperan memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang secara teknis berada di Dinas DPPKBP3A. Untuk ini berhasil diraih Kabupaten Layak anak dan *responsive gender* kategori Anugerah Kategori Nindya. Sebagai respon terhadap penanganan anak kehilangan orang tua yang meninggal akibat covid-19, maka Bappeda khususnya dalam pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam pembangunan di era pandemi sebagai satu langkah solutif untuk tetap dapat menampung aspirasi anak sebagai salah satu masukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar tanpa pelibatan masa yang besar. Bappeda selanjutnya

berinovasi untuk mendesain wadah untuk penyaluran aspirasi anak di Kabupaten Blitar yang diberi nama Jaring Aspirasi Anak (Jarik) Blitar. Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan menjadi point penting untuk menghasilkan pembangunan sesuai perspektif anak. Dengan menggandeng Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, wadah tersebut disusun ke dalam instrument elektronik berbasis web yang pada akhirnya mampu menangkau seluruh anak Kabupaten Blitar sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Inovasi tersebut selanjutnya mendapat penghargaan sebagai Pemenang I dalam kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopi Lypulara) Tahun 2021.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang terkait, antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). SAKIP sendiri adalah sebuah siklus sistem dimana dalam proses perencanaan sampai evaluasi harus konsisten dan saling terkait dan mendukung. Adapun detail realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagian Organisasi	1	3	1.041.734.043	1.026.229.600	98,51%
Bagian Umum	1	3	10.809.069.000	8.896.245.029	82,30%
Bagian Pengadaan Barang Jasa	1	3	548.315.000	534.506.650	97,48%
Bagian Hukum	1	3	610.146.400	595.688.413	97,63%
Bagian Administrasi Pembangunan	1	3	871.289.300	861.180.380	98,84%
Bagian Perekonomian	1	3	3.010.144.534	2.565.474.082	85,23%
Bagian Tata Pemerintahan	1	4	654.154.450	636.269.132	97,27%
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	5	5.461.766.864	5.396.412.957	98,80%
Inspektorat	3	10	14.817.352.455	12.399.075.720	83,68%
BKPSDM	1	4	3.503.730.250	3.026.697.078	86,38%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat	5	10	11.849.855.150	11.005.656.748	92,88%
Bappeda	3	11	3.066.134.045	2.914.556.432	95,06%
<b>Serapan Anggaran</b>			<b>56.243.691.491</b>	<b>49.857.992.221</b>	<b>88,65%</b>

Hambatan / Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Adanya *refocusing* anggaran, maka target kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya terutama terkait pemeriksaan OPD.

2. Adanya mandatory diluar perencanaan pengawasan yaitu terkait Pelaksanaan Posh Audit Belanja terkait Anggaran Covid dan adanya situasi pandemi, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi
4. Terkait penilaian SAKIP di tingkat Kabupaten, masih terdapat perangkat daerah yang mendapatkan predikat C, sehingga evaluasi dan pembinaan perlu ditingkatkan.
5. Beberapa aspek variabel pengukuran Indeks Sistem Merit belum dapat memenuhi target dan memerlukan perbaikan, antara lain aspek pengembangan karir, aspek promosi mutasi dan aspek manajemen kinerja.
6. Beban kerja SDM aparatur yang menyusun dan melaporkan LKjIP yang tinggi dan masih banyak menangani semua administrasi di sekretariat.
7. Pemahaman SOP namun beberapa perangkat daerah yang melibatkan tenaga protokol belum seluruhnya memahami SOP tersebut, sehingga koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau event belum seluruhnya dapat berjalan optimal.
8. Penyusunan Pengisian RUP masih belum bisa tepat waktu bisa terpublikasikan semua di awal tahun anggaran dan masih ada kesalahan pengisian SIRUP baik metode maupun jadwal pelaksanaan yang hanya sekedar terisi.
9. Perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang cepat tidak direspon aktif oleh OPD yang bersangkutan.
10. Pemahaman strategi pelaksanaan tender masih lemah.
11. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan kompeten di bidang teknologi informasi masih sangat kurang.
12. Masih belum stabilnya pasokan internet ke OPD sehingga masih diterima beberapa keluhan mengenai internet.
13. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa
14. Banyak peraturan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yang harus diterapkan tahun anggaran 2021, membutuhkan proses SOP baru dan tahapan yang masih belum stabil.

Solusi yang ditempuh menghadapi permasalahan :

1. Peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis dan Pendampingan penyusunan laporan kinerja aparatur dilakukan lebih intensif.

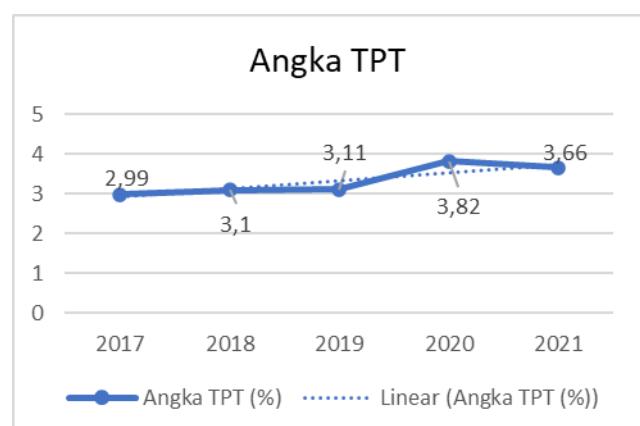
2. Menurunkan target kegiatan yang disesuaikan dengan refocusing anggaran.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan posh audit sampai dengan akhir Tahun 2020.
4. Pelaksanaan koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi akan diintensifkan mulai Tahun 2021.
5. Peningkatan sistem merit dilakukan melalui antara lain: penyusunan Perkada terkait Suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dan Pola Karir, serta penyusunan Dokumen Informasi tentang Analisa Permasalahan Kinerja dan Penyusunan Strategi Penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.
6. Mengusulkan penambahan personil ke BKPSDM atau mengganti personil yang lebih kompeten dan sesuai dengan peta jabatan dan analisa jabatan terutama pada jabatan pelaksana.
7. Mengikutsertakan karya-karya inovasi dalam berbagai ajang pameran baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun diseminasi yang lebih intensif perlu ditingkatkan, misalnya melalui media massa (television, radio, dan media cetak) maupun perumusan tindak lanjut pengembangan karya inovasi oleh OPD terkait. Selain itu, tingkat kepesertaan Krenotek masih dapat ditingkatkan melalui perpanjangan tahapan sosialisasi yaitu pada tahun 2021 akan dimulai sejak Februari sehingga semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gelaran tersebut.
8. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang diharapkan, koordinasi aktif dari perangkat daerah selaku penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu yang mencukupi sehingga persiapan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.
9. Memberikan pemahaman terkait strategi pengadaan kepada OPD sehingga proses tender/seleksi dapat dilakukan di awal tahun.
10. Mengusulkan pengadaan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, baik itu melalui pengangkatan.
11. Pada tahun 2021, Dinas Kominfo telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan merekrut dua orang tenaga programmer dan satu orang desainer grafis untuk mendukung kinerja publikasi dan membuat aplikasi-aplikasi sederhana guna mempermudah dan mendukung kinerja OPD. Selanjutnya secara umum Dinas Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis, maupun kegiatan lain yang berpotensi menambah kemampuan sumberdaya aparatur OPD.

12. Ke depan akan dilakukan backup jaringan maupun assesment jaringan ke OPD-OPD untuk evaluasi permasalahan dan rekomendasi penyelesaian sehingga gangguan internet dapat diminimalisir. Selain itu, juga akan ditingkatkan kualitas infrastruktur jaringan melalui *fiber optic* sehingga komunikasi lebih lancar.
13. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha, aparat pemerintahan dan masyarakat mencakup seluruh kecamatan, serta monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar, dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
14. Peningkatan kuantitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan melalui: (1) sosialisasi hasil pengukuran perkembangan desa; (2) rapat koordinasi lintas OPD guna sinkronisasi program/kegiatan yang memiliki target dan sasaran ke desa; (3) penetapan program prioritas masing-masing desa yang tertuang dalam dokumen perencanaan desa dan APBDes (sesuai pedoman dari Kemendes RI).
15. Sosialisasi kepada seluruh OPD secara intensif tentang sistem aplikasi perencanaan pembangunan yang baru, peningkatan sistem dan operasional prosedur, serta kualitas SDM pengelola sistem perencanaan.

**Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat Strategis 7**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,72	3,66	101,61%	2,99
Pengeluaran Perkapita (Rp.000)	11.152	10.757	96,46%	12.155
<b>Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran Strategis</b>			<b>99,04%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja rata-rata sasaran strategis yaitu 99,04% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator 2 buah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pengeluaran Perkapita Rp.000. Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Kabupaten Blitar mencatat sejarah dalam angka pengangguran terbuka (TPT) dimana selalu berada di bawah Provinsi



Jawa Timur dan Nasional. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 6 tahun terakhir menunjukkan tren menurun secara moderat, yaitu 0,06%, pertahun dimana tahun 2014 sebesar 3,64% dan terus menurun menjadi 2,99% tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan dan puncaknya pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,83%, yang merupakan angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir dan seiring dengan resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19, aktivitas terjadi PHK besar-besaran dari sektor formal produksi, yang akibatnya telah mendorong peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Blitar segera cepat pulih dengan turunnya angka TPT tahun 2021 sebesar 0,16% menjadi 3,66%. Kondisi ini menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Blitar karena pada tahun yang sama hampir seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan angka TPT. Capaian angka TPT Kabupaten Blitar tahun 2021 ini tetap masih jauh di bawah angka TPT Jawa Timur yaitu 5,74% dan nasional 6,49%. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tahun	Angka TPT
2017	2,99
2018	3,1
2019	3,11
2020	3,82
2021	3,66

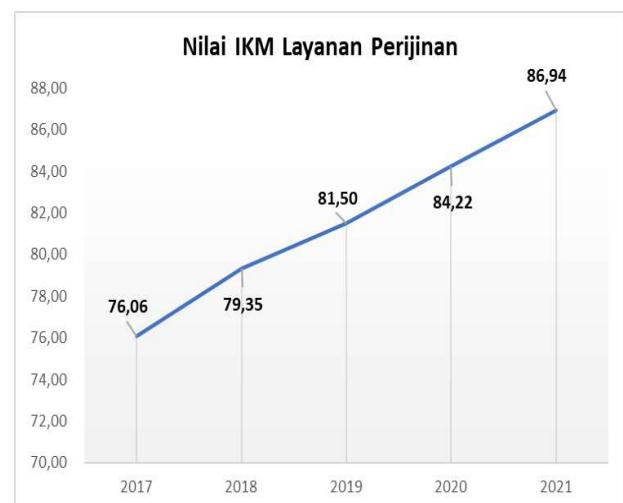
Sektor basis ekonomi Kabupaten Blitar yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Capaian kinerja ini menunjukkan pembangunan Kabupaten Blitar berbasis sektor pertanian masih mampu memiliki tingkat produksi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang tumbuh positif 3,02% juga telah mendorong pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK. Untuk meningkatkan layanan ketenagakerjaan, maka tanggal 28 Desember 2021 diresmikan dan dilaunching Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Perijinan tercapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Realisasi investasi di Kabupaten Blitar terus meningkat setiap tahun dengan kemudahan perijinan investasi yang hanya 1 jam selesai. Nilai IKM Pelayanan Perijinan DPMPTSP menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahun. Tahun 2017 nilai IKM sebesar 76,06 poin, dengan menindaklanjuti hasil IKM maka

dilakukan kebijakan perbaikan tindak lanjut, sehingga tahun 2018 naik menjadi 79,35 poin dan akhir tahun 2019 meningkat lagi menjadi 81,5 poin. Pelayanan investasi di era pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021 justru mendorong semangat inovasi bagi pegawai di dinas ini. Pada tahun ini setidaknya ada 2 inovasi yang dilakukan yaitu 1) LOSS BERSAMA MANTAN (Layanan OSS bersama ANSOR dan FATAYAT NU). Melalui LOSS BERSAMA MANTAN masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan perizinan dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan ANSOR dan FATAYAT NU yang gratis tanpa dipungut biaya dan 2) LOSS DOL (Layanan OSS di Desa Secara Online) kemudahan pelayanan masyarakat dan pendampingan pelayanan perizinan oleh petugas di Desa yang gratis tanpa dipungut biaya. Inovasi ini melengkapi inovasi sebelumnya, yaitu “Ini Baru Joss Banget Mas” dan “Fast DS”.

Program “Ini Baru Joss Banget Mas” meningkatkan akses pelaku usaha dapat lebih mudah untuk memohon/mandatarkan ijin usaha dan investasi Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan ijin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Sedangkan, *Digital Signature* adalah aplikasi I-Mobile

(sekarang Imobil v.2), inovasi aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik berbasis website. Aplikasi ini mendorong proses perizinan lebih efektif dan efisien, sehingga nilai kepuasan pelayanan diharapkan meningkat dengan nilai 84,22 poin tahun 2020 dan 86,94 poin di tahun 2021 atau (kategori Sangat Baik). Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Nilai IKM Layanan Perijinan
2017	76,06
2018	79,35
2019	81,50
2020	84,22
2021	86,94

Hampir seluruh program dan kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Blitar masih bisa dilaksanakan dan memenuhi target sesuai yang ditetapkan. Pada Pelayanan Penanaman Modal jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin dari target 7.500 pelaku usaha ternyata pelaku usaha yang mengajukan izin usaha mencapai 9732 pelaku usaha. Tetapi capaian tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah pusat terhadap pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yang syarat utamanya adalah harus memiliki izin usaha. Hal ini menyebabkan izin usaha yang terbit mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari target 1.500 izin terbit terealisasi 13.333 izin. Pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan monev dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi. Jumlah realisasi investasi dari target 10.700 Miliar telah mencapai 9.600 Miliar masih sampai dengan triwulan III karena pada aplikasi LKPM untuk triwulan IV belum keluar datanya dan belum dapat diunduh. Nilai realisasi investasi meningkat secara signifikan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp.9.600 miliar dan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dari grafik di atas juga dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Miliar)
2017	350,77
2018	1.452,76
2019	4.666,35
2020	1.402,61
2021	9.600,00

Terkait dengan capaian kinerja pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Blitar, terjadi tren kenaikan moderat selama 5 tahun terakhir yaitu rata-rata naik Rp.232 ribu per orang/tahun atau 2,33%. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari

pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Tingkat konsumsi juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran perkapita penduduk tahun 2017 sebesar Rp.9.828 ribu/orang/tahun dan terus meningkat sangat signifikan sampai tahun 2019 yaitu menjadi Rp.10.861 ribu/orang/ tahun. Tahun 2020 sedikit turun akibat pandemi covid-19 dan sebagai dampak penurunan PDRB. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan pengeluaran perkapita penduduk yaitu Rp.10.757 ribu/orang/tahun. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Pengeluaran Perkapita (Rp. 000,-)
2017	9.828
2018	10.327
2019	10.861
2020	10.654
2021	10.757

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Tenaga Kerja	5	15	4.466.111.550	4.425.708.274	99,10%
Dinas Penamanan Modal dan PTSP	6	11	4.670.070.190	4.293.984.143	91,95%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>			<b>9.136.181.740</b>	<b>8.719.692.417</b>	<b>95,52%</b>

Hambatan/Kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Cakupan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan masih sangat kurang, beban kerja pegawai sangat tinggi dan akibatnya pelayanan tidak maksimal.
2. Masih perlunya ditingkat mind set dan kompetensi pemberi layanan, dimana hampir

semua proses perizinan sudah menggunakan aplikasi sistem online.

3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB).
4. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK dan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya.
5. Masih tingginya minat masyarakat Kabupaten Blitar untuk bekerja ke luar negeri, namun perlindungan terhadap CTKI/TKI belum maksimal.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam pencapaian sasaran kinerja adalah:

1. Dilakukan usul penyesuaian sumber daya aparatur, dimana idealnya dibutuhkan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezzeting atau pemetaan kebutuhan aparatur, saat ini masih kurang 25 personil.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana pelayanan untuk kompeten dan memiliki mind set melayani kepada masyarakat secara lebih baik.
3. Pengembangan berbagai aplikasi pelayanan publik harus terus dilakukan mengingat luas wilayah Kabupaten Blitar dan sebaran penduduk ke pelosok wilayah Blitar, maka salah satu cara meningkatkan layanan dan mengurangi waktu tunggu adalah dengan menggunakan aplikasi sistem dan desentralisasi pelayanan ke kantor kecamatan.
4. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha, aparat pemerintahan dan masyarakat mencakup seluruh kecamatan, serta monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar, dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
5. Sosialisasi tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam rangka percepatan pada pembuatan peraturan perusahaan PP maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha dan menjaga iklim investasi sehat.
6. Sosialisasi tentang ketentuan UMK serta sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.
7. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan.
8. Fasilitasi rekrutmen dan seleksi karyawan melalui aplikasi e-jobfair untuk penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Blitar dan beberapa perusahaan di Batam.

9. Pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair) dengan mengundang perusahaan dari wilayah Blitar Raya maupun dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 pameran bursa kerja (job fair) dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan kepesertaan Perusahaan mencapai 135 perusahaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pencari kerja bisa bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan pencari kerja/penganggur dapat terserap lebih maksimal.
10. Inovasi berupa Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA). Melalui peningkatan aplikasi Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA) ini diharapkan :
  - a) memudahkan para pencari kerja untuk mengakses informasi yang valid tentang jumlah lowongan kerja baik itu lokal blitar, luar daerah, dan luar negeri; dan
  - b) masyarakat / angkatan kerja mengetahui berbagai program kegiatan pelatihan baik itu pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.
11. Pelayanan investasi di era pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021 justru mendorong semangat inovasi bagi pegawai di dinas ini untuk melakukan berbagai inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2021 setidaknya 2 inovasi yang dilakukan yaitu 1) LOSS BERSAMA MANTAN (Layanan OSS bersama ANSOR dan FATAYAT NU). Melalui LOSS BERSAMA MANTAN masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan perizinan dan NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan ANSOR dan FATAYAT NU yang gratis tanpa dipungut biaya dan 2) LOSS DOL (Layanan OSS di Desa Secara Online) kemudahan pelayanan masyarakat dan pendampingan pelayanan perizinan oleh petugas di Desa yang gratis tanpa dipungut biaya. Inovasi ini melengkapi inovasi sebelumnya, tahun 2020, yaitu “Ini Baru Joss Banget Mas” dan “Fast DS”. Program “Ini Baru Joss Banget Mas” meningkatkan akses pelaku usaha dapat lebih mudah untuk memohon/mandaftarkan ijin usaha dan investasi Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan ijin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Sedangkan, *Digital Signature* adalah aplikasi I-Mobile (sekarang Imobil v.2), inovasi aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik berbasis website.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Strategis 8 Perekonomian yang Berkelanjutan.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur (indeks)	66,88	78,60	117,52%	76,66
Indeks Risiko Bencana (indeks)	160,62	146,16	109%	142
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	64,90	65,53	100,97%	67,67
<b>Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran Strategis</b>			<b>109,16%</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur tercapai sebesar 109,16% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Indikator ini disusun dengan 3 indikator yaitu Indeks Infrastruktur, Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Infrastruktur dibentuk dengan 5 sub indikator, yaitu persentase jalan kondisi mantap, persentase jembatan dalam kondisi mantap, dan jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan, 2 sub indikator yaitu persentase rumah tangga berakses air minum dan rumah tangga bersanitasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja masing-masing sub indikator tersaji sebagai berikut:

Indikator	OPD	Target	Realisasi	Capaian
Jalan Kondisi Baik (%)	PUPR	66,88%	78,13%	116,82%
Jembatan Kondisi Baik (%)	PUPR	66,88%	76,47%	114,34%
Saluran Irigasi Kondisi Baik (%)	PUPR	66,88%	88,74%	132,68%
Fasilitasi Pendampingan Air Minum (%)	Perkim	66,88%	66,88%	100,00%
Pengelolaan Drainase Lingkungan (%)	Perkim	66,88%	82,76%	123,74%
<b>Realisasi Kinerja Layanan Infrastruktur</b>			<b>78,60%</b>	<b>117,52%</b>

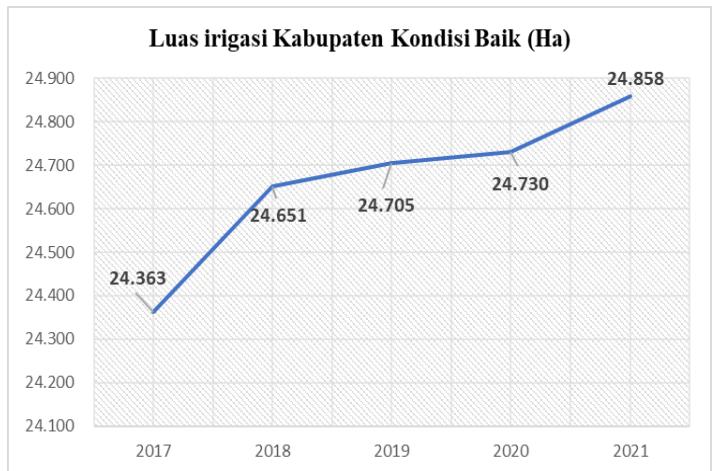
Capaian kinerja setiap sub indikator menunjukkan tren kenaikan setiap tahun dan keberhasilan capaian target kinerja pada dinas pendukungnya. Perkembangan jalan Kabupaten Blitar dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Sesuai SK Bupati Blitar no 188/492/409.06/KPTS/2019 Tahun 2019, panjang jalan daerah kabupaten adalah 1.558,30 km. Jika tahun 2017 jalan kondisi mantap sepanjang

1.025,36km maka terus terjadi peningkatan selama 5 tahun menjadi 1.217,69 km pada tahun 2021. Selama masa pandemi Covid-19, infrastruktur tetap menjadi prioritas program kerja daerah agar tetap dapat memberikan akses ekonomi produktif masyarakat dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dari grafik di samping dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Jalan Kabupaten Blitar Kondisi Baik (km)
2017	1.025,36
2018	1.051,77
2019	1.052,00
2020	1.181,13
2021	1.217,69

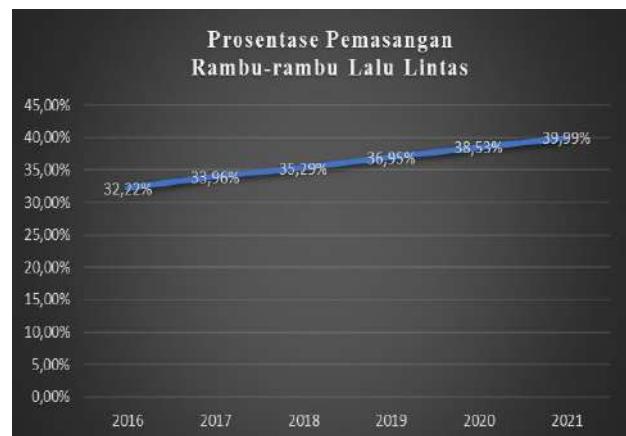
Target kinerja sub indikator Jalan Kondisi Mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tercapai sebesar 78,13% atau Berhasil dari target kinerja 1.558,30 km hanya mampu terealisir sepanjang 1.217,69 km. Capaian kinerja cakupan (luas) Kabupaten Blitar dalam kondisi baik (Ha) sampai tahun 2020 juga menunjukkan tren peningkatan luasannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015, luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Blitar adalah 28.012 Ha. Tahun 2016 luas saluran irigasi kondisi baik adalah 24.091,18 Ha atau 86% dan terus meningkat sampai akhir tahun 2020 seluas 24.730 Ha atau 88,28%. Tahun 2021, terjadi kenaikan luasan irigasi yang berfungsi dengan baik, yaitu seluas 24.858 Ha atau 88,74%. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



<b>Tahun</b>	<b>Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Ha)</b>
2017	24.363
2018	24.651
2019	24.705
2020	24.730
2021	24.858

Jumlah penduduk yang memiliki akses Air Minum dan Air Bersih juga terus meningkat pada 4 tahun terakhir sebagai wujud komitmen atas hak-hak dasar layanan masyarakat. Jika tahun 2016 baru sebanyak 850.785 orang atau 74% dari jumlah penduduk, maka tahun 2019 telah menjadi 945.023 orang atau 81,42%, atau naik rata-rata 3,24% setiap tahun dan tahun 2020 sebanyak 955.012 (82%) penduduk dan akhir tahun 2021 sudah naik signifikan menjadi 1.666.268 jiwa atau 82,3% jumlah penduduk Kab. Blitar. Berdasarkan target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka pada akhir 2025, seluruh penduduk (100%) harus dapat mengakses air bersih. Sedangkan, untuk indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi, tahun 2016 sebanyak 242.438 rumah jumlah ini terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 246.417 rumah tangga dan pada akhir tahun 2020 telah menjadi 300.137 dan tahun 2021 menjadi 301.725 rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak. Pemenuhan infrastruktur dasar penduduk menjadi salah satu upaya meningkatkan keseimbangan menjaga produktivitas ekonomi daerah dan pola hidup sehat di masa pandemi covid-19 ini. Secara umum, capaian kinerja dalam pemenuhan cakupan layanan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, dapat dicapai dengan baik.

Kondisi jalan yang baik dan mantap juga didukung oleh sarana lalu lintas jalan raya berupa rambu-rambu lalu lintas. Persentase pemenuhan rambu-rambu lalu lintas terus meningkat semasa 5 tahun terakhir meskipun dengan persentase kenaikan rendah karena banyaknya ruas jalan yang membutuhkan rambu-rambu. Jika pemenuhan rambu lalu lintas tahun 2016 sebesar 32,22% dari yang dibutuhkan, maka pada tahun 2020 terus meningkat naik menjadi 36,95% dari kebutuhan dan tahun



2021 menjadi 39,99%. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:

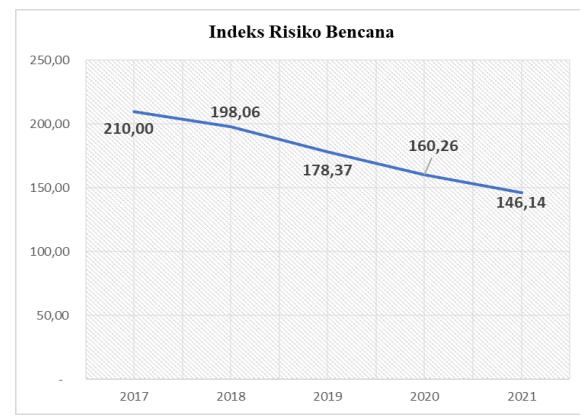
Tahun	Prosentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
2016	32,22 %
2017	33,96 %
2018	35,29 %
2019	36,95 %
2020	38,53 %
2021	39,99 %

Salah satu unsur keselamatan lalu lintas adalah perlengkapan keselamatan jalan yang dari grafik diatas menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, selain pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Target terpenuhinya 39,99% dari total kebutuhan perlengkapan jalan sebanyak 11.603 titik, sedangkan realisasi pengadaan rambu pada tahun 2021 sebanyak 169 unit. Jumlah perlengkapan jalan terpasang sampai dengan tahun 2021 sebanyak 487.789 unit (mencapai 39,99%). Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 1,46% dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini dicapai dengan dilaksanakannya perbaikan/perawatan perlengkapan keselamatan jalan untuk mempertahankan kondisi eksisting dan fungsi dari setiap perlengkapan keselamatan jalan terpasang.

Capaian kinerja pelayanan infrastruktur dasar ini didukung oleh berbagai inovasi dinas, yaitu: 1) SI KOI JANTAN (*Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum*) merupakan sarana yang disediakan untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga, khususnya untuk melayangkan aspirasi, kritik, pengaduan maupun pertanyaan berkaitan dengan Jalan, Jembatan, dan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Blitar kepada Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar; dan 2) Aplikasi SPK ini adalah Sistem Informasi Sinkronisasi data berbasis *webbase* untuk pengolahan dan penyimpanan data terutama dokumen kontrak (SPK) yang dapat diakses secara bersamaan oleh pejabat pengadaan di seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar. Inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan ada 2, Aplikasi perlengkapan jalan dan pengaduan masyarakat dan sistem pendaftaran dan pembayaran uji KIR kendaraan secara elektronik berbasis QRIS.

Kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur makin intensif pada tahun 2021. Sebanyak 151 Kejadian Bencana, dimana pada kondisi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada 2020 terjadi 85 Kejadian Bencana. Hal ini menyebabkan kenaikan faktor komponen bahaya (dengan bobot 40%) yang merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, angka ini meningkatkan jumlah skor IRBI dari tahun lalu yaitu 160 (2019) meningkat menjadi 169,22 (2020). Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penetuan indeks risiko bencana, maka dalam melakukan perhitungan indeks risiko bencana Tahun 2021 adalah komponen bahaya (H) dan kerentanan (V) mengikuti hasil kajian indeks risiko bencana, sedangkan untuk komponen kapasitas (C) dihitung/dinilai per tahun. Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sub bidang urusan bencana pada Kabupaten Blitar, akan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Maka, tahun 2021 skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar meningkat menjadi 0,56, naik 0,04 dari skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2020 yaitu 0,52. Angka Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar menunjukkan angka tren yang terus menurun rata-rata 15,97 per tahun. Tahun 2021 angka IRB sebesar 146,14 poin.

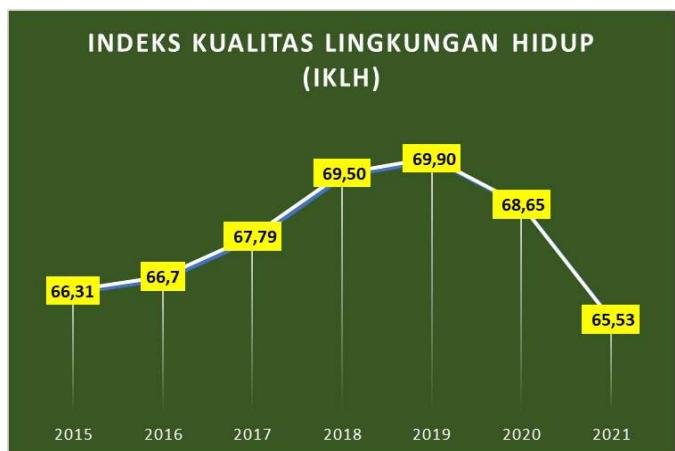
Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Indeks Risiko Bencana
2017	210,00
2018	198,06
2019	178,37
2020	160,26
2021	146,14

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelaanjutan adalah 100,97% atau Kategori **Sangat Berhasil** yang menggunakan 3 (tiga) indikator. Capaian kinerja IKLH didukung oleh 3

indikator kinerja lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. IKLH Kabupaten Blitar tahun selama 5 tahun (2015-2019) terus mengalami kenaikan rata-rata 0,9 poin sampai dengan tahun 2019. Tahun 2015 nilai IKLH sebesar 66,31 poin dan angka ini terus naik secara moderat sehingga tahun 2019 bernilai 69,90 dan capaian kinerja tahun 2019 adalah 100% dari target. Akan tetapi, seiring dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran akibat pandemi covid-19, maka dilakukan rasionalisasi anggaran secara signifikan hampir 50%. Tahun 2020 mulai ada tren penurunan IKLH dan terus turun sampe dengan tahun 2021 yaitu menjadi 65,53 atau rata-rata turun 2,19 akibat pandemi covid-19. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



Tahun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2015	66,31
2016	66,7
2017	67,79
2018	69,50
2019	69,90
2020	68,65
2021	65,53

Dari 3 indikator tersebut IKLH, 2 indikator tercapai kinerjanya 100% yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam 2 tahun berturut-turu yaitu 2019 - 2021, dan 1 indikator yaitu kualitas air tidak tercapai yaitu tahun 2020 tercapai 84,75% dan tahun 2021 tercapai 99,82%. Tahun 2021, Indeks Kualitas Udara terealisir 87,46 poin melampaui target kinerja ditetapkan yaitu 86,7 poin atau tercapai 100,88% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan terealisir 43,03 poin yang melampaui target 41,41 poin atau tercapai 103,94%. Sedangkan, untuk Kualitas Air hanya tercapai 99,82% yaitu terealisir 55 poin dari 55,1 poin target yang ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja pada 3 indikator

IKLH tahun 2021 semua mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Tahun 2021, Indeks Kualitas Udara terealisir 87,46 poin menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100,94 poin. Indeks Kualitas Air juga mengalami penurunan dari 60 poin di tahun 2020 menjadi hanya 55 di tahun 2021. Terakhir, untuk indikator Kualitas Tutupan Lahan terealisir 43,03 poin yang angkanya turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 50,91 poin. Maka, secara umum, capaian kinerja seluruh unsur IKLH tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2020, dari angka 68,65 poin di tahun 2020 turun menjadi 65,53 poin pada tahun 2021.

Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa inovasi program, yaitu Bank Pohon. Adalah inovasi baru yang memadukan sistem pelayanan perbankan dalam hal manajemen keluar masuk bibit tanaman dengan model pengelolaan persemaian bibit permanen oleh BPDAS Brantas yang diterapkan di Kabupaten Blitar untuk mendukung percepatan Gerakan Blitar Menanam. Bank Pohon memiliki arti penting sebagai inovasi untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan bibit tanaman penghijauan lingkungan. Bentuk layanan Bank Pohon bagi masyarakat meliputi: Bantuan bibit pohon, Donasi/sedekah dan CSR Bibit Pohon, Adopsi Pohon, Edukasi tentang Gerakan Blitar Menanam.

Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik). Balistik adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai. Penggunaan plastik sekali pakai dapat menyebabkan pemasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai (PSP). Tujuan inovasi Balistik adalah: 1) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP; 2) mencegah pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan diakibatkan oleh penggunaan PSP; 3) menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem; dan 4) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan PSP; 5) menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai inovasi program prioritas pencapaian kinerja gerakan lingkungan telah dilakukan antara lain 1) Gerakan Blitar Menanam yang tahun 2020 dilakukan pada 47



lokasi meliputi pantai, desa, RPH, dan tepi sungai dengan jumlah bibit di tanam sebanyak 21.825 bibit dan melibatkan sebanyak 3.234 orang; 2) Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) yang tahun 2020 dilakukan 4 lokasi yaitu RTH Kanigoro, Pasar Srengat, Jembatan Glondong dan Tepi Sungai Lodagung, yang mana gerakan ini sudah dilegalkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik, 3) Gerakan Terpadu Kali Bersih (Getar Kasih) sebagai gerakan sadar fungsi sungai dan menjaga kebersihannya yang dilakukan pada 12 lokasi sungai (kali) dan sudah dilegalkan dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 dan didukung pembentukan pengurus Forum Kali Bersih, sosialisasi dan pembinaan, dengan kegiatan bersih-bersih sampah dan limbah di Sungai Lemon pada tanggal 02 Maret 2020, Sungai Brantas di Desa Minggirsari tanggal 10 Juli 2020, bersih-bersih Sungai Glondong pada tanggal 23 Desember 2020 bersama Perum Jasa Tirta, dan 4) gerakan PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yaitu evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah B3. Program ini juga di dukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang melalui program pengendalian dan kepatuhan tata ruang sesuai dengan RT/RW daerah.

Untuk capaian kinerja indikator Ketaatan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melakukan berbagai kegiatan pengendalian baik melalui bentuk fasilitasi dan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang maupun penerbitan dokumen yang berisi pengendalian tata ruang, dengan capaian kinerja kegiatan 100%. Kebijakan yang mendukung IKLH adalah tentang pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini baru tercapai 1,3% dari ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 20%. Namun demikian, angka capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berkisar 1,1% dari seluruh wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberikan perhatian yang lebih besar pada pengendalian tata ruang ini dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan segera menyusun master plan pemenuhan Rung Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,



Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi atas program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	17	154.260.026.413	143.357.865.062	92,93%
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	15	111.120.099.976	108.134.365.964	97,31%
Dinas Perhubungan	2	15	13.589.065.355	12.810.575.943	94,27%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	2	11	7.851.181.500	7.328.215.213	93,34%
Satpol PP – Pemadam Kebakaran	3	4	2.647.883.000	2.466.715.685	93,16%
Dinas Lingkungan Hidup	8	15	13.752.916.003	12.968.676.456	94,30%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>			<b>303.221.172.247</b>	<b>287.066.414.32</b>	<b>94,67%</b>

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan pencapaian indikator kinerja pelayanan infrastruktur dasar adalah:

1. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (*overloading*) pada ruas jalan.
2. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada.
3. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan.
4. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan.
5. Perlunya penyusunan Manual O & P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA).
6. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan.
7. Perlunya pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air (seperti HIPPA/P3A, Komir) di wilayah Kabupaten Blitar.
8. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
9. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

10. Masih adanya konflik kasus pertanahan antara lain 1) Perkebunan Karangnongko: Diredistribusi seluas 103 ha dari total 133 ha (605 kk) dan 2) Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Perkebunan Soso.
11. Masih belum optimalnya pengelolaan lahan parkir baik dari sisi sumber daya manusia pengelola maupun intensifikasi peningkatan retribusi daerah.
12. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan dan kurangnya sarana prasarana terutama mobil dinas, mobil pemadam kebakaran dan alat komunikasi anggota, seragam linmas yang bertugas di Linmas.
13. Program penanganan kebakaran belum maksimal karena 1) kurangnya sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Pemadaman Kebakaran; 2) kurangnya kapasitas SDM sehingga belum bisa memenuhi target SPM; 3) Belum adanya pos bantu di wilayah yang mengakibatkan lambatnya informasi; dan 4) Belum ada relawan yang membantu di setiap daerah.
14. Masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak sampah rumah tangga (domestik) yang dibuang ke sungai.
15. Makin meningkatnya penggunaan produk plastik, sehingga meningkatkan volume sampah dan limbah (terutama plastik sekali pakai).
16. Masih fluktuatifnya kondisi parameter uji baku mutu air, antara lain parameter BOD, parameter Total Fosfat, dan parameter TSS, yang dapat sewaktu-waktu berubah cepat pada perubahan kondisi air, misalnya air hujan yang besar.
17. Sulitnya akses pengambilan sampel di daerah hulu. Daerah hulu seharusnya merupakan kawasan yang belum terdapat aktifitas manusia namun sulitnya akses jalan/jembatan dan keterbatasan kendaraan maka pengambilan sampel dilakukan di dekat pemukiman masyarakat, sehingga Pengambilan sampel yang hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan, sehingga tidak ada nilai banding.
18. Keterbatasan alat ukur kualitas udara, sehingga nilai kualitas didapat dari data berasal dari pemantauan udara ambien dengan metode passive sampler dan hanya melakukan pemantauan udara ambien sesaat selama 1 jam (idealnya 24 jam).
19. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mengajukan ijin pemanfaatan ruang terutama untuk alih fungsi lahan dan bangunan melalui IMB.

Solusi yang diambil atas permasalahan yang dihadapi tersebut dalam mendukung indikator kinerja pelayanan infrastruktur dasar adalah:

1. Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai *International Roughness Index* (IRI)/Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan).
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
3. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan.
4. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.
5. Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, pembentukan Komir, re-organisasi HIPPA/P3A dan penyusunan Manual O&P.
6. Penerapan *reward and punishment* bagi aparatur maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
7. Intensifikasi mediasi dengan pihak yang berkonflik dan koordinasi dengan pemegang otoritas atas tanah tersebut.
8. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan parkir yang meliputi: a) Peningkatan kapasitas SDM jukir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian; b) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP dll); c) Adanya *reward and punishment* bagi jukir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran, d) Peningkatan kesejahteraan jukir dengan pemberian honorarium sesuai UMR Daerah; dan e) Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.
9. Penambahan jumlah SDM Satpol PP dan peningkatan kualitas SDM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melalui pendidikan dan pelatihan.
10. Perlunya penambahan sarana prasarana (mobil damkar, mobil patroli).
11. Intensifikasi penyuluhan/ sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan perda, tanggap bencana, maupun upaya pemberantasan narkoba dan miras.

12. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Pemadaman Kebakaran; program relawan pemadam kebakaran; dan pengembangan pos bantu di wilayah yang mengakibatkan lambatnya informasi.
13. Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat melalui gerakan dan aksi bersih sampah bersama pegiat, masyarakat, dan aparat desa, kecamatan, dan kabupaten serta stakeholder terkait.
14. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik yang mengatur tentang pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Blitar dan pengembangan usaha ekonomi kreatif pemanfaatan berbasis limbah plastik (reuse).
15. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggandeng pemerintah desa.
16. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kepada Dunia Usaha dalam pengelolaan limbah.
17. Melaksanakan Sosialisasi kepada Pengusaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Memberikan fasilitasi atau pengarahan kepada pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah.
19. Melaksanakan penanaman pohon di tepi jalan kabupaten sebagai penyerap karbon.
20. Melaksanakan pengadaan tanaman untuk ditanam dikawasan permukiman.
21. Melaksanakan pembinaan Ds/Kel. Berseri, Adiwiyata, Eco Pesantren dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.
22. Melaksanakan pembinaan kepada Ds/Kel. dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.

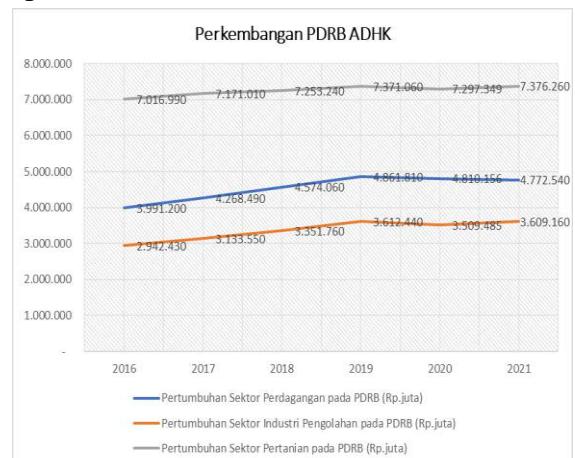
**Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.  
Strategis 9**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,03	0,01	0,97%	76,66
Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar	0,95	5,83	613,68%	142

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)				
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	1,76	2,45	139,20%	67,67
Jumlah Kunjungan Wisata (jumlah)	1.609.379	1.287.414	79,99%	3.029.584
ICOR	5,80	7,04	121,38%	5,76
<b>Capaian Kinerja Rata-rata Sasaran Strategis</b>			<b>191,05%</b>	

Capaian rata-rata kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan sebesar 191,05% atau Kategori **Sangat Berhasil** jumlah indikator kinerja utama sebanyak 5 (lima) buah. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 mulai positif yaitu 3,02%, sehingga mendorong pertumbuhan semua sektor positif. Ketiga sektor pendukung sasaran strategis juga tumbuh positif, yaitu Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB tumbuh positif sebesar 5,83% dan tercapai lebih dari 100% dari target, Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB akan tumbuh 2,45%, dan untuk Sektor Pertanian terhadap PDRB akan tumbuh 0,01%. Untuk indikator kunjungan wisata masih terus meningkat dan pada tahun 2021 sebanyak 1,29 juta orang dan dengan angka ICOR sebesar 7,04 atau tercapai 121,38%. Angka pertumbuhan semua sektor yang positif ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Blitar sudah membaik.

Indikator kinerja per sektor ekonomi menunjukkan tren angka yang terus meningkat sampai tahun 2019 dan sedikit menurun akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan di tahun 2021 seiring dengan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi, maka angka sektor ekonomi kembali meningkat. Sektor perdagangan kembali tumbuh sebesar 5,85% di tahun 2021 atau sebesar 6.954,47 miliar, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 2,45% di tahun 2021 atau sebesar 5.310,44 miliar, dan sektor pertanian tumbuh sebesar 0,01 % atau sebesar 12.116, miliar di tahun 2021. Pertumbuhan positif ini sebagai hasil kebijakan percepatan pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Blitar yang sangat intensif dan agresif. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:



<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Sektor Perdagangan pada PDRB (Rp. Juta)</b>	<b>Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB (Rp. Juta)</b>	<b>Pertumbuhan Sektor Pertanian pada PDRB (Rp. Juta)</b>
2016	3.991.200	2.942.430	7.016.990
2017	4.268.490	3.133.550	7.171.010
2018	4.574.060	3.351.760	7.253.240
2019	4.861.810	3.612.440	7.371.060
2020	4.810.156	3.509.485	7.297.349
2021	4.772.540	3.609.160	7.376.260

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan produktif melalui berbagai program pembentukan wirausaha muda, yaitu bekerja sama dengan USAID melaksanakan program USAID JAPRI (Jadi Pengusaha Muda) dan program ABANGWIRA (Audisi Pengembangan Wirausaha) yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang menyasar wirausaha muda yang telah merintis usaha dengan tujuan untuk menaikkan *omzet*. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan kegiatan SEDEKAH ILMU. Melalui SEDEKAH ILMU diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi penambah penghasilan keluarga di masa pandemi. Sedekah Ilmu adalah Alumni UMKM Naik Kelas 2020 yang menyedekahkan ilmunya kepada peserta secara sukarela/tanpa honor. Hasilnya sebanyak 0,98% usaha kecil yang menjadi wirausaha telah memenuhi target ditahun 2021. Jumlah UM Kabupaten Blitar pada tahun 2021 total jumlah UM di Kabupaten Blitar sebanyak 31.056 UM. UM yang terdata terdiri dari berbagai sektor usaha antara lain usaha makanan dan minuman, kerajinan, fashion, jasa, perdagangan. Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berbagai program pengembangan koperasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya pengurus koperasi dan akses permodalan koperasi. Tahun 2021, sebanyak 30 koperasi yang mendapat fasilitasi rekom izin usaha simpan pinjam, sebanyak 20 koperasi yang fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP, sebanyak 150 pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota, dan 120 koperasi yang mengikuti bimtek

penguatan kelembagaan dan manajemen. Berbagai program dan kegiatan ini mendorong, sebanyak 22,80% menjadi koperasi yang berkualitas. Salah satu kriteria koperasi yang berkualitas adalah koperasi aktif. Dimana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kemudian terjadi peningkatan volume usaha dan assetnya.

Terkait dengan bidang perdagangan, Pemerintah Kabupaten Blitar mendorong para pelaku usaha melakukan ekspor. Pertumbuhan nilai ekspor non migas tahun 2021 adalah sebesar 893,75% atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena ada penambahan objek pelaku ekspor yaitu CV. Cherry Blossom dengan nilai ekspor yang relative dominan diantara pelaku ekspor lainnya. Capaian lain adalah tertib Usaha direpresentasikan dengan jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan sebanyak 3 rekomendasi dari 3 permohonan yang masuk, melampaui target yang ditetapkan yaitu 2 rekomendasi dan persentase kinerja realisasi pupuk terealisasi 62,32% dibawah target yang ditetapkan yaitu 87%. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) terealisasi sebesar Rp.27.995,74 miliar atau jauh di atas target yang ditetapkan. Upaya percepatan ekspor dilakukan *couching* adi eksport untuk menghasilkan eksportir-eksportir mandiri dari Kabupaten Blitar. Pelatihan ini bekerjasama dengan eksport center Surabaya dengan target 25 pelaku usaha yang dibina melalui sistem *coaching* dan pembinaan melalui sistem audisi, serta pendampingan langsung dan kunjungan ke lokasi usaha peserta adi eksport. Terakhir adaslah Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang terealisir sebanyak 44.808 orang. Di tahun 2021 juga dilakukan fasilitasi perdagangan online melalui pelatihan marketing online/ Audisi dan Inkubasi Marketing Online (Adi Marko) yang diikuti 100 pelaku usaha kecil dan mikro.

Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan kebijakan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 diselaraskan dengan tetap mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui keluarnya Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatapan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 sebagai pedoman tatan baru (*new normal*) dalam penyelengaraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan *refocusing* anggaran sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah untuk tetap menjaga kestabilan antara tujuan kesehatan (keselamatan) dan ekonomi. Inovasi program dan kegiatan terus dilakukan oleh berbagai perangkat daerah. Salah satu inovasi agresif dan massif di masa pandemi covid-19 adalah dengan mengembangkan

berbagai aplikasi sistem software pelayanan. Inovasi untuk tetap mendorong aktivitas pedagang pasar yang tinggi ini adalah Komitmen Bupati Blitar bertempat di Pasar Wlingi dengan *melaunching* “Kang Jimbang” atau Tukang Uji Timbangan oleh Bupati Blitar. Kang Jimbang, petugas penguji timbangan akan mulai bergerak aktif melakukan tugasnya ke berbagai lokasi di Kabupaten Blitar, di pasar, SPBU dan Wajib Tera Utang yang lain, sehingga Kang Jimbang Datang Masyarakat Tenang.

Di bidang industri, program/kegiatan penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, telah dilakukan fasilitasi terhadap 16.867 fasilitasi dan melebih target 14.500 fasilitasi. Demikian juga, fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tercapai 16.897 fasilitasi dari 14.970 target fasilitasi. Berbagai kebijakan telah mendukung pencapaian sasaran kinerja perindustrian dan perdagangan yaitu Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) yang tercapai Rp. 27.995,74 miliar dan melebihi target Rp. 3.000 juta, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas sebanyak 44.808 orang dan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas tercapai 101.469 juta.

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki areal pertanian seluas 158.879ha yang tingkat produksinya terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Tahun 2019 hasil produksi pertanian sebanyak 937.382 ton dan terus menurun sebesar 103.197 ton di tahun 2020, sehingga menjadi 834.186 ton. Angka ini terus menurun di tahun 2021, menjadi tinggal 801.556 ton atau turun 32.630 ton. Namun demikian, ada beberapa komoditas tanaman pangan yang angka produksinya meningkat, antara lain padi. Hal ini berarti untuk tanaman padi masing menguntungkan petani. Produksi padi pada tahun 2019 sebanyak 320.383 ton dan terus naik pada tahun 2020 menjadi 340.216 dan 391.714 ton di tahun 2021 atau naik rata-rata sebesar 35.666 ton pertahun. Sedangkan, untuk 2 tanaman pangan unggulan lainnya yaitu jagung dan ubi kayu terus mengalami penurunan. Hasil produksi tanaman jagung di tahun 2019 sebesar 391.806 ton terus menurun dan menjadi 324.767 ton di tahun 2021. Demikian juga dengan tanaman ubi kayu, produksinya terus menurun, jika pada tahun 2019 sebanyak 121.902 ton menjadi 73.901 ton di tahun 2021. Untuk tanaman semusim, tanaman bawang merah yang trennya terus meningkat dari 17.775 ton di tahun 2019 menjadi 139.862 ton di tahun 2021 atau naik rata-rata 61.044 ton per tahun. Tanaman semusim lainnya yaitu cabe besar, cabe rawit dan jamur (m2) trennya terus menurun,

dimana tanaman cabe besar 184.799 ton tahun 2019 menjadi 106.841 ton, kemudian cabe rawit dari 1.505.982 ton menjadi 713.370 ton di tahun 2021. Capaian kinerja pertanian, yaitu Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) tercapai 6,65% dari target 2% dan produktivitas tanaman perkebunan juga tercapai 5,6% dari 1% target yang ditetapkan.

Pada urusan pangan, beberapa program/kegiatan prioritas untuk mendukung hasil capaian kinerja antara lain a) pengelolaan program pengelolaan sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan capaian kinerja program tahun 2021 prosentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/LPM) aktif dapat direalisasikan 32,6% melebihi dari yang ditargetkan 31,4%. Beberapa pembangunan LPM sebanyak 1 unit sehingga menambah jumlah LPM yang aktif sebelumnya menjadi 14 LPM yang aktif dari total 43 LPM, 2) program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yaitu prosentase ketersediaan pangan (beras) dapat terealisasikan 261,38% melebihi dari yang ditargetkan 167,52%. Ketersediaan beras melebihi jumlah kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Blitar yaitu jumlah ketersediaan pangan (beras) 250.775 ton/th sedangkan kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Blitar yaitu 95.941 ton/th sehingga surplus 154.834 ton/th. Jumlah konsumsi energi 1.949 kkal/hari/kapita hampir mendekati ideal yaitu 2.000 kkal/hari/kapita, 3) penanganan Kerawanan Pangan, prosentase daerah rawan pangan 18,55% lebih sedikit dari target 20,97%. Jumlah desa rentan pangan yang semula sebanyak 52 desa bisa terkurangi menjadi 46 desa dari total 248 desa/kel, dan 4) Pengawasan Keamanan Pangan, prosentase bahan pangan segar aman konsumsi 100% lebih banyak dari yang ditargetkan 90%. Pengujian residu pestisida pada 20 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dinyatakan 100% aman dikonsumsi.

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian telah melebihi target yang ditetapkan. Produktivitas tanaman pangan yaitu padi dan jagung mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 6,9 ton/ha di tahun 2020 menjadi 7,2 ton/ha di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan melalui program kegiatan telah berhasil mendongkrak produksi dari 309.893 ton menjadi 391.714 ton. Namun, untuk komoditas hortikultura masih memiliki capaian yang berada dibawah target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebanyak -9,8%. Hal ini diakibatkan penurunan produktivitas tanaman cabe yang cukup drastis di tahun 2021, dari 5,6 ton/ha menjadi 4,6 ton/ha. Penurunan yang cukup drastis ini masih belum mampu didongkrak oleh produktivitas bawang merah yang sebenarnya mengalami kenaikan yaitu dari 10,6 ton/ha menjadi 10,7 ton/ha. Penurunan

produktivitas cabe diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu adanya serangan penyakit *Layu fusarium* serta kemunduran periode tanam, dimana daerah Blitar Selatan yang merupakan sentra cabe di Kabupaten baru mulai menanam cabe pada bulan Desember yang mengakibatkan penurunan produksi.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap menjadi salah satu prioritas program di dinas Peternakan dan Perikanan. Program pengelolaan perikanan tangkap ini di indikator dengan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2021 ditargetkan 2.300 Ton dan terealisasi 2.2.83,3 Ton atau 99,2%. Kegiatan pendukung antara lain nelayan Perairan Umum Daratan ( PUD) yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target pada Tahun 2021 sebanyak 40 nelayan, pembinaan/ pendampingan nelayan kecil sebanyak 266 orang, dan pelatihan diversifikasi usaha perikanan sebanyak 115 orang, pembangunan dan pembentukan kelembagaan nelayan kecil sebanyak 95 orang, dan pembiayaan kemitraan usaha sebanyak 56 orang. Selain itu program budidaya perikanan juga intensif dan gencar dilakukan, karena Blitar dikenal sebagai daerah penghasil ikan hias koi. Capaian kinerja atas program budidaya ini antara lain budidaya ikan konsumsi (ton) sebanyak 17.841 ton dan budidaya ikan hias sebanyak 225.281.796 ekor atau melebihi target. Berbagai kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/bimbingan kelembagaan/fasilitasi permodalan/asuransi yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM/usaha pembudidaya ikan menuju pembudidaya ikan yang mandiri di era globalisasi. Tahun 2021 dilakukan pelatihan kepada 144 (seratus empat puluh empat) pembudidaya. Dilanjutkan dengan fasilitasi perijinan dan fasilitasi pembentukan kelompok pembudidaya dan pembinaan.

Sub sektor Peternakan juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Ternak besar didominasi oleh sapi potong sebanyak 153.829 ekor, disusul populasi kambing yaitu 157.100 ekor dan domba sebanyak 8.290 ekor. Sedangkan, ternak unggas didominasi oleh ayam petelur sebanyak 20.051.400 ekor, disusul ayam pedaging (broiler) sebanyak 3.396.800 ekor dan ayam kampung sebanyak 2.862.560 ekor. Jumlah mengalami angka pertumbuhan jika dibandingkan dengan populasi tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk produksi daging, telur dan susu, tersaji berikut:

#### Jumlah Produksi Ternak

Komoditi	2018	2019	2020	2021
Daging (Ton)	61.121,14	61.217,44	43.291,49	18.369,51
Susu (Ton)	34.928,82	35.630,16	40.392,24	32.540,13
Telur (Ton)	164.927,79	174.389,19	179.962,40	191.967,80

<b>Jumlah (Ton)</b>	<b>260.977,75</b>	<b>271.236,79</b>	<b>263.646,14</b>	<b>242.877,44</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Terkait dengan hasil produksi ternak, terjadi kenaikan selama 3 tahun berjalan, baik untuk daging, susu maupun telur. Kabupaten Blitar adalah salah satu lumbung telur dan daging di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 3,93% dibandingkan dengan tahun 2020. Populasi ternak di Kabupaten Blitar masih tetap bertahan di masa pandemi, meskipun jumlah hasil produksi menurun akibat dari tingkat konsumsi masyarakat menurun. Menunjukkan bahwa dampak pandemi Covis-19 sudah masuk mempengaruhi tingkat konsumsi makanan pokok masyarakat.

#### **Jumlah Populasi Ternak dan Unggas**

No	Jenis Ternak	Satuan	2019	2020	2021
1	S a p i Potong	Ekor	151.164	151.720	153.829
2	Sapi Perah	Ekor	16.973	19.260	19.640
3	Kerbau	Ekor	1.620	1.510	1.120
4	B a b i	Ekor	9.346	9.620	2.940
5	Kambing	Ekor	154.200	154.800	157.100
6	D o m b a	Ekor	7.150	8.610	8.290
7	Ayam Ras Petelor	Ekor	17.076.200	19.060.000	20.051.400
8	Ayam Bukan Ras	Ekor	2.675.400	2.925.300	2.862.560
9	Ayam Ras Pedaging	Ekor	4.022.800	3.820.600	3.396.800
10	I t i k	Ekor	1.476.000	1.960.000	1.510.000
11	Entok	Ekor	76.900	73.200	64.900
<b>Jumlah</b>			<b>26.148.772</b>	<b>28.698.640</b>	<b>28.228.579</b>

Data perkembangan jumlah kunjungan wisatawan/pengunjung yang tetap tumbuh di berbagai destinasi di Kabupaten Blitar rata-rata 351.254 orang pertahun atau naik rata-rata 18,32% mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2020, seiring adanya pandemi covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, maka jumlah kunjungan wisatawan turun. Tahun 2016 jumlah wisatawan sebanyak 1.700.473 kunjungan yang terus meningkat rata-rata 18,32% setiap tahun selama 3 tahun sampai tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 2.754.998 kunjungan. Akan tetapi, seiring dengan adanya pandemi covid, maka jumlah wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu menjadi 1.532.662 orang atau turun -44,35%. Kondisi ini masih berlanjut di tahun 2021 karena masih adanya



kebijakan pembatasan kegiatan, sehingga masih jumlah angka 1.250.000 kunjugngan atau turun -18,44%. Tahun 2022, akan menjadi kebangkitan bagi usaha pariwisata di Kabupaten Blitar ditargetkan 1,7 juta kunjungan. Dari grafik di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisata</b>
2016	1.700.473
2017	1.727.127
2018	2.365.310
2019	2.754.236
2020	1.532.662
2021	1.250.000

Beberapa Perangkat Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini antara lain: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Jumlah		Anggaran		Capaian (%)
	Program	Keg	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pertanian dan Pangan	4	5	11.287.020.269	10.590.913.703	93,83%
Dinas Peternakan dan Perikanan	3	13	3.576.208.160	3.176.744.581	88,83%
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6	7	1.676.343.400	1.670.814.619	99,67%
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8	14	6.233.422.838	5.792.535.864	92,93%
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3	6	1.421.368.750	1.166.790.399	82,90%
Dinas Penanaman Modal	6	11	4.670.070.190	4.293.984.143	91,95%
<b>Rata-Rata Serapan Anggaran</b>			<b>28.864.433.607</b>	<b>26.691.783.309</b>	<b>92,47%</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Masih belum tersedia data sektoral IKM yang baik dan akurat sebagai dasar kebijakan.
2. Unit Metrologi Legal Kabupaten Blitar belum memiliki database potensi WTU.
3. Database koperasi yang akurat sulit belum ada karena beberapa alamat sulit ditemukan dan terbatasnya tenaga pendata.
4. Masih minimnya kemampuan koperasi untuk bergerak di sektor riil.

5. Tingkat partisipasi sekolah dalam lomba perkoperasian masih rendah, terutama sekolah-sekolah yang berlokasi jauh dari pusat ibukota.
6. Proses regenerasi pengurus koperasi masih lemah.
7. Masih belum memasyarakatnya pola penganekaragaman pangan di masyarakat Kabupaten Blitar yang tercermin dari skor Pola Pangan Harapan belum mencapai 100.
8. Terbatasnya ketersediaan air irigasi untuk mencukupi kebutuhan di seluruh lahan pertanian di sepanjang tahun dari sumber sumur dalam, sumur dangkal, jaringan irigasi tersier (JIT), DAM Parit, embung, dan lain-lain.
9. Kemampuan petani melakukan budidaya pertanian untuk menunjang peningkatan intensitas tanam dan kemampuan petani melakukan pengolahan secara sempurna lahan pada areal persawahan yang mempengaruhi kualitas tanah, masih sangat terbatas.
10. Ketersediaan bibit ternak yang berkualitas (unggul) dan penyediaan pakan serta kualitas bahan pakan ternak masih rendah dan tidak stabil.
11. Ketergantungan bahan pakan/obat-obatan pada impor negara lain, misalnya bungkil kedelai (BK) dan meat bone meal (MBM) dan antibiotika, sangat tinggi.
12. Tingginya ancaman penyakit hewan strategis, yaitu Antrax, ASF dan Flu Burung (AI)
13. Jumlah puskeswan, tenaga penyuluhan dan sarana serta prasarana pencegahan penyakit hewan masih kurang.
14. Sistem pengelolaan usaha peternakan bersifat tradisional & belum ramah lingkungan.
15. Kurangnya promosi ternak dan produk peternakan serta minimnya informasi harga komoditas peternakan akurat sehingga fluktuasi harga produk peternakan yang tinggi.
16. Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi pengolahan produk hasil peternakan.
17. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pengawasan/ monitoring pemotongan hewan qurban, misalnya alat bedah yang relatif sederhana (cutter), mekanisme pelaporan yang manual (by sms/wa) dan 1 (satu) orang petugas pemantau yang bertugas untuk 1 (satu) desa dengan waktu pemotongan yang serentak sulit untuk melaksanakan pemeriksaan ante mortem ( sebelum pemotongan).
18. Masih adanya masyarakat pencari ikan di perairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil.
19. Pola penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih berorientasi pada penangkapan harian sehingga daerah penangkapan hanya sekitar pantai, belum dapat menjangkau lokasi penangkapan yang lebih jauh.

20. Harga pakan pabrik masih relatif mahal, hal ini merupakan kendala besar dalam suatu siklus produksi perikanan, sehingga biaya produksi relatif tinggi.
21. Akses pembudidaya terhadap informasi kebijakan pemerintah dan permodalan perbankan masih rendah.
22. Belum adanya tim ahli cagar budaya dan tenaga administrasi di Museum Daerah.
23. Masih terbatasnya pengembangan akses dan obyek wisata di titik-titik wisata terkendala status kepemilikan lahan.
24. Masih lemahnya promosi daya tarik wisata Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembinaan, dengan pembentukan grup-grup pembinaan dengan memanfaatkan media sosial telah dirintis dan dikembangkan sebagai pembinaan, konsultasi dan koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Blitar.
2. Memanfaatkan sampling obyek data IKM sebagai dasar melakukan pembinaan ke daerah maupun pendataan melalui grup-grup media sosial.
3. Pengembangan database sektoral IKM, koperasi, dan peta potensi WTU yang baik dan akurat sebagai dasar kebijakan pengembangan
4. Koordinasi aktif dengan Forum UMKM maupun Dewan Koperasi Daerah terkait rencana penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis/kegiatan sejenis.
5. Meningkatkan volume dan cakupan tenaga pendamping, proses pendampingan, pelatihan dan monitoring evaluasi.
6. Memasyarakatkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dan memperbanyak kegiatan penyuluhan, pembinaan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
7. Aktif berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah tingkat SLTA dalam kegiatan koperasi.
8. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang sehingga pengembangan budidaya serelia maupun umbi-umbian dapat dilakukan secara optimal serta membangun koordinasi dan kerjasama intensif dengan stakeholder terkait pangan dan gizi diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

9. Meningkatkan pembangunan sistem irigasi melalui pembangunan JIT (Jaringan Irigasi Tersier), Irigasi Air Tanah Dangkal, Dam Parit dan melakukan rehab pintu air sehingga petani dapat melakukan pembagian atau pengaturan stok air irigasi pada musim kemarau.
10. Meningkatkan pelatihan bagi petani, khususnya pelatihan budidaya pertanian yang dapat menunjang peningkatan intensitas tanam.
11. Sosialisasi dan fasilitasi perubahan sistem pengolahan lahan secara sempurna secara bertahap dilakukan perubahan menjadi pengolahan lahan secara sederhana, dan dukungan kecukupan alat pengolahan lahan seperti traktor atau tenaga kerja untuk pengolahan lahan perlu diperhatikan.
12. Menerapkan program UBSUS SIWAB, yang mewajibkan betina produktif wajib bunting dengan drooping straw berkualitas/bibit unggul dari Provinsi secara gratis diharapkan bisa memberikan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas baik.
13. Koordinasi dengan pihak terkait baik peternak, Dinas Peternakan Prov. Jatim, Kementerian dan BULOG dalam rangka memantau ketersediaan bahan pakan ternak berkualitas.
14. Penyediaan sarana pengujian berupa laboratorium pakan ternak yang terakreditasi diharapkan mampu memberikan pelayanan pada masyarakat dalam mengontrol kualitas pakan yang diberikan.
15. Pembinaan dan Pelatihan penerapan teknologi pakan ternak dengan memanfaatkan bahan pakan lokal serta pembinaan dan pelatihan terkait pemanfaatan sumber daya lokal seperti fitobiotik (contoh: jamu-jamuan), probiotik, prebiotik, asamlaktat (contoh: ekstrak belimbing wuluh).
16. Ancaman penyakit hewan strategis dapat dicegah dengan pembinaan, pelatihan serta pemberian vaksin berserta desinfektan gratis untuk biosecurity-nya.
17. Melakukan pengajuan tenaga jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam rangka mengatasi keterbatasan SDM Puskeswan serta sarana dan prasarana pencegahan penyakit hewan.
18. Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait usaha peternakan yang ramah lingkungan, sistem pengelolaan usaha peternakan modern yang menerapkan teknologi serta pengolahan produk non pangan asal hewan sehingga diperoleh produk hasil peternakan yang bernilai tinggi.

19. Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan akibat pencari ikan diperairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, pelatihan pembuatan jaring ikan sehingga dapat membantu nelayan untuk melakukan penangkapan ikan lebih maksimal.
20. Memfasilitasi bantuan bagi kapal penangkapan ikan melalui kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Pusat.
21. Memperluas dan menambah intensitas pelaksanaan kegiatan “Gemar Makan Ikan” sehingga dapat mempromosikan budaya konsumsi ikan dan produk olahannya yang diharapkan dapat mendorong permintaan produk perikanan dan tingkat konsumsi ikan pada masyarakat.
22. Pelatihan tentang pembuatan pakan ikan utamanya memanfaatkan bahan pakan lokal.
23. Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ikan pada Unit Pemberian Ikan dan pengadaan indukan koi unggul.
24. Mensosialisasikan dan memaksimalkan Perda Cagar Budaya, dan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi guna penetapan cagar budaya.
25. Melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (instansi vertikal maupun swasta).
26. Meningkatkan upaya-upaya promosi untuk mengangkat potensi wisata di Kabupaten Blitar, salah satunya memunculkan icon wisata kabupaten Blitar.

### **3.2. Capaian Kinerja Makro Ekonomi Daerah**

Capaian kinerja indikator makro ekonomi daerah tahun 2021 telah menunjukkan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu 3,29%. Pertumbuhan ini sebagai akibat dari hasil kebijakan percepatan pemulihan ekonomi daerah oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh jajaran instansi vertikal dan masyarakat. Angka pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan pertumbuhan positif Provinsi Jawa Timur sebesar 3,57% dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Beberapa indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan mulai meningkat dan membaik, seiring dengan adanya tren pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut, antara lain Pendapatan perkapita penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka capaian kinerja ekonomi dan kesejahteraan Kabupaten Blitar antara lain *pertama* Angka Kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,65% atau 112.620 jiwa yang mana

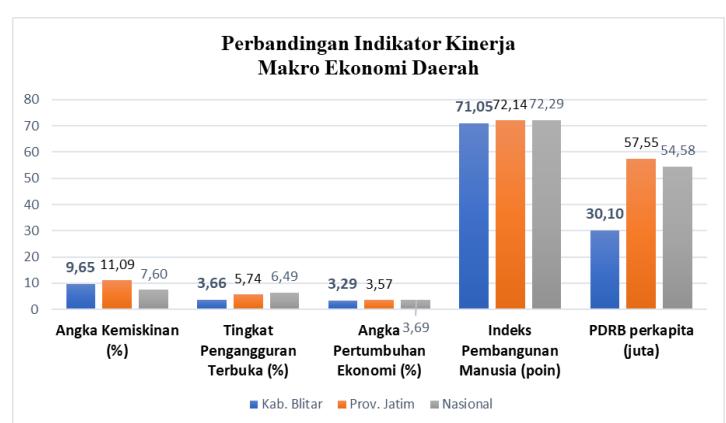
angka ini naik sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 9,33%. Angka kemiskinan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka di Jawa Timur yaitu 11,09%. *Kedua*, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2021 tercapai 3,66% atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 3,82%. Capaian angka TPT Kabupaten Blitar ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 5,74% dan angka TPT Nasional sebesar 6,49%. *Ketiga*, Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif sebesar 3,29% dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,29%. *Keempat*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan yang selalu positif yaitu tahun 2016 sebesar 68,88 poin menjadi 71,05 poin atau naik rata-rata 0,43 poin pertahun. *Kelima*, tingkat pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Blitar tahun 2017 sebesar 27,365 juta dan naik menjadi 30,10 juta/jiwa/tahun tahun 2021 atau meningkat sebesar rata-rata 676,6 ribu pertahun.

Capaian kinerja sasaran strategis memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian kinerja ekonomi makro daerah. Pembandingan capaian kinerja indikator makro ekonomi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana posisi kinerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar dibandingkan dengan lingkup regional Jawa Timur dan Nasional.

#### **Perbandingan Capaian Beberapa IKU Terhadap Capaian Kinerja Regional dan Nasional Tahun 2021**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi Kab. Blitar	Provinsi Jatim	Nasional	Sumber
1	Angka Kemiskinan (%)	9,65	11,09	7,60	BPS
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,66	5,74	6,49	BPS
3	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,02	3,57	3,69	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,05	72,14	72,29	BPS
5	PDRB perkapita (Rp.juta,-)	30,72	57,55	54,58	BPS

Kinerja makro ekonomi daerah Kabupaten Blitar menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Percepatan kebijakan pemulihan pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Blitar, telah memberikan



dampak *multiplier effect* terhadap kondisi kesejahteraan dan ekonomi warga masyarakat. Beberapa capaian kinerja menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 9,65% angka ini di bawah Provinsi Jawa Timur (11,09%) dan sedikit di atas angka Nasional (9,78%). Sedangkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,66% yang mana angka ini jauh di Bawah Provinsi Jawa Timur (5,74%) dan Nasional (6,49%).

### **3.2. Serapan Anggaran**

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah pendukung. Hasil rekapitulasi capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Prosentase PPKS (%)	11,70	11,70	100%	13.071.800.864	11.122.670.675	85,09%	14,91%
2	Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat	2. Indeks Kesalehan Sosial	80	81,74	102,19%	7.511.796.732	7.013.766.066	93,37%	8,82%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	3. Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,46	12,63	100,99%	565.080.247.364	505.526.927.242	89,46%	11,53%
		4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,39	7,50					
		5. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,52	73,61					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
4.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	6. Indeks Pembangunan Pemuda	54,44	51,83	95,21%	1.421.368.750	1.166.790.399	82,90%	12,31%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,94	81,08	100,17%	25.114.389.338	23.652.709.386	94,18%	5,99%
6.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	8. Nilai SAKIP (indeks) 9. Indeks SPBE (indeks) 10. Indeks Sistem Merit (indeks) 11. Persentase Desa Mandiri (%) 12. Indeks Inovasi Daerah (indeks)	B 3,2 135 4,55 60,15	B 2,76 99 4,55 56,58	90,73%	56.243.691.491	49.857.992.221	88,65%	2,08%
7.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	13. Tingkat Pengangguran Terbuka (tingkat) 14. Pengeluaran	3,72 11.152	3,66 10.757					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		Perkapita (000)							
8.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	15. Indeks Infrastruktur (indeks)	66,88	78,60	109,16%	303.221.172.247	287.066.414.32	94,67%	14,49%
		16. Indeks Risiko Bencana (indeks)	160,62	146,16					
		17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	64,90	65,53					
9.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	18. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1,03	0,01	191,05%	28.864.433.607	26.691.783.309	92,47%	98,58%
		19. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	0,95	5,83					
		20. Pertumbuhan PDRB Industri	1,76	2,45					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		Pengolahan (%)							
		21. Jumlah Kunjungan Wisata (iumlah)	1.609.379	1.287.414					
		22. ICOR	5,80	7,05					
		<b>Rata-rata Efisiensi (Inefisiensi) Kinerja</b>							<b>19,14%</b>

Selama 2021 berbagai prestasi berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai capaian kinerja Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut antara lain:

1. Penerimaan Penghargaan Juara I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional,
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2020 (5x berturut-turut)
3. DAR DER DOR berhasil memenangkan beberapa lomba inovasi seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur yang berhasil mendapatkan juara 2 dari 30 besar peserta di Jawa Timur,
4. Disabet 3 Penghargaan Festival TIK Nasional (Pengelola Sosial Media Terbaik, Tata Kelola Organisasi dan Program Pemberdayaan Desa).
5. Penghargaan Smart City Kategori Smart Goverment.
6. Penghargaan Top Digital Award.
7. Juara III Durian favorit pada acara festival durian provinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Juara Stand kategori komoditi khusus pada acara APKASI EXPO tahun 2021 di Jakarta.
9. Mendukung Program OPOP.
10. Lomba UKM berprestasi kategori Ecogreen (UKM Turi Putih)
11. Juara I Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur
12. Juara II Lomba PKK Tingkat Propinsi Jawa Timur
13. Juara IV Lomba BBGRM Tingkat Propinsi Jawa Timur
14. Juara Harapan I Lomba BUM Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur
15. Penerimaan Penghargaan Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga [PKK] Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ( Juara II ).
16. Penerimaan Penghargaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ( Juara IV )
17. Penerimaan Penghargaan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ( Juara Harapan I ).





## BAB 4 PENUTUP DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 dan masuk tahun ke-1 (tahun awal RPJMD), yang mana prioritas program dan kegiatan RKPD 2021 adalah tahun percepatan pemulihan akibat resesi ekonomi Pandemi Covid-19. Kabupaten Blitar telah berupaya dan berhasil melaksanakan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dapat dicapai sebesar 3,02%. Kondisi ini berdampak capaian kinerja indikator ekonomi daerah antara lain, kenaikan pendapatan perkapita penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan menurunnya angka kemiskinan. Capaian angka TPT Kabupaten Blitar sangat rendah yaitu 3,66% dan ini jauh di bawah capaian Provinsi Jawa Timur 5,74% dan bahkan nasional 6,49%. Keberhasilan ini makin nampak karena hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kenaikan angka TPT di tahun 2021 ini. Sedangkan, untuk capaian angka kemiskinan juga rendah yaitu 9,65% atau sekitar 112.650 jiwa. Angka ini juga di bawah Provinsi Jawa Timur yaitu 11,09%. Sektor basis ekonomi daerah yaitu pertanian, perdagangan, industri olahan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negatif. Pemerintah Kabupaten Blitar bergerak cepat melakukan berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan.

Capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 terhadap 9 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja adalah sebesar 109,84% atau kategori **Sangat Berhasil** dan serapan anggaran rata-rata sebesar 90,70% sehingga terjadi **Efisiensi** kinerja rata-rata sebesar **19,14%**. Efisiensi kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu rata-rata efisiensi 8,62% atau meningkat **10,59%**. Apabila diuraikan capaian kinerja tiap indikator kinerja, dapat dihasilkan sebanyak 15 atau 68,18% dapat dicapai dengan **Sangat Berhasil** (di atas 100%), sebanyak 6 indikator atau 27,27% dicapai dengan **Berhasil**, sebanyak 1 indikator atau 4,54% dicapai dengan **Kurang Berhasil**. Kenaikan ini sebagai wujud keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan meskipun dengan *refocusing* anggaran. Beberapa indikator kinerja yang capaianya masih rendah dan memerlukan tindak lanjut kebijakan perbaikan di masa mendatang. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :

Rendahnya capaian kinerja sasaran strategis adalah karena masih adanya *refocusing* anggaran untuk pemulihan krisis ekonomi global akibat Pandemi Covid-19. Angka tren pertumbuhan ekonomi Blitar 2021 yaitu 3,29%, angka ini seiring dengan pertumbuhan positif Provinsi Jawa Timur sebesar 3,57% dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Pertumbuhan ini berdampak terhadap kinerja ekonomi makro daerah dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan warga masyarakat. Beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut, antara lain Pendapatan perkapita penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka capaian kinerja ekonomi dan kesejahteraan Kabupaten Blitar antara lain *pertama* Angka Kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,65% atau 112.620 jiwa yang mana angka ini naik sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 9,33%. Angka kemiskinan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka di Jawa Timur yaitu 11,09%. *Kedua*, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2021 tercapai 3,66% atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 3,82%. Capaian angka TPT Kabupaten Blitar ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 5,74% dan angka TPT Nasional sebesar 6,49%. *Ketiga*, Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif sebesar 3,29% dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,29%. *Keempat*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan yang selalu positif yaitu tahun 2016 sebesar 68,88 poin menjadi 71,05 poin atau naik rata-rata 0,43 poin pertahun. *Kelima*, tingkat pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Blitar tahun 2017 sebesar 27,365 juta dan terus naik menjadi 30,10 juta/jiwa/tahun di tahun 2021 atau meningkat sebesar rata-rata 676,6 ribu pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif telah memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang sedang melakukan pemulihan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

**Tabel 4.1.**

**Ringkasan Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Prosentase PPKS (%)	<b>100%</b>	<b>85,09%</b>	<b>14,91%</b>
2	Terwujudnya	2. Indeks Kesalehan	<b>102,19%</b>	<b>93,37%</b>	<b>8,82%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
	Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Sosial			
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	3. Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	<b>100,99%</b>	<b>89,46%</b>	<b>11,53%</b>
		4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)			
		5. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)			
4.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	6. Indeks Pembangunan Pemuda	<b>95,21%</b>	<b>82,90%</b>	<b>12,31%</b>
5.	Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa.	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>100,17%</b>	<b>94,18%</b>	<b>5,99%</b>
6.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	8. Nilai SAKIP (indeks)	<b>90,73%</b>	<b>88,65%</b>	<b>2,08%</b>
		9. Indeks SPBE (indeks)			
		10. Indeks Sistem Merit (indeks)			
		11. Persentase Desa Mandiri (%)			
		12. Indeks Inovasi Daerah (indeks)			
7.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat	13. Tingkat Pengangguran Terbuka (tingkat)	<b>99,04%</b>	<b>95,52%</b>	<b>3,52%</b>
		14. Pengeluaran Perkapita (000)			
8.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang	15. Indeks Infrastruktur	<b>109,16%</b>	<b>94,67%</b>	<b>14,49%</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
	Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan	(indeks) 16. Indeks Risiko Bencana (indeks) 17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)			
9.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	18. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) 19. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%) 20. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%) 21. Jumlah Kunjungan Wisata (iumlah) 22. ICOR	191,05%	92,47%	98,58%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>109,84%</b>	<b>90,70%</b>	<b>19,14%</b>

## 4.2. Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan protokol kesehatan ketat harus segera dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, dengan melakukan *refocusing* anggaran yang benar-benar produktif dan memberikan dampak langsung pada pencapaian kinerja instansi Pemerintah Daerah sebagai sasaran strategis.

2. Menyelaraskan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD yang baru yaitu 2021 – 2026 (tahun ke-1) dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan.
3. Melakukan peningkatan sinkronisasi indikator dan target kinerja antara RPJMD dan Renstra OPD pendukung serta kualitas indikator kinerja dengan memperhatikan unsur-unsur SMART sehingga bisa menghasilkan pelaporan yang lebih akuntabel.
4. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil
5. Membangun sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan selaras dengan target-target daerah dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Blitar

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar dan semoga Pandemi Covid-19 segera berlalu.

# LAMPIRAN



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kabupaten Blitar Tahun 2021*



## BUPATI BLITAR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. RINI SYARIFAH  
Jabatan : Bupati Blitar

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 26 Februari 2021



**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		(3)	(4)	
1	Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran	1	Angka Kemiskinan (%)	8,65
		2	Pendapatan per kapita (Juta rupiah/Orang/Tahun)	40,35
		3	Indeks daya beli	0,7266
		4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,46
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	1	Percentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	96,74
3	Terwujudnya stabilitas wilayah	1	Percentase penanganan konflik (%)	100
		2	Percentase penegakan PERDA (%)	100
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1	Indeks Pendidikan	0,66
5	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan	0,8220
6	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	78,50
7	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	A
		2	Nilai LPPD	3,0542
		3	Opini BPK	WTP
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sangat Baik
9	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	1	Percentase pertumbuhan sektor Perdagangan pada PDRB (%)	7,23
		2	Percentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB (%)	7,78
		3	Percentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB (%)	3,00
		4	Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	5.742.647
10	Meningkatnya pelayanan perijinan	1	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik
11	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71
		2	Percentase Ketaatan Tata Ruang (%)	85
12	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1	Percentase desa berstatus pratama (%)	0

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	134,623,123,850
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	554,296,550
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	26,036,137,700
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	88,389,800
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	197,383,984,994
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	677,420,000
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	637,314,000
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	231,050,000
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17,161,308,000
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26,522,551,250
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7,829,153,350
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	379,275,300
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70,882,535,476
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	184,859,000
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	670,489,300
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16,086,242,170
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15,135,629,000
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,487,751,338
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	16,389,691,954
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	327,316,700
21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10,260,267,340
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15,021,623,274
23	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	640,432,000
24	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1,770,150,000
25	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	440,039,400
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,753,014,750
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	338,247,850
28	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,424,196,910

29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3,118,599,600
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,205,933,130
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,139,960,000
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2,003,797,875
33	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	23,400,000
34	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	650,969,025
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2,026,993,500
36	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	386,209,500
37	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	134,977,275
38	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	75,092,000
39	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	314,597,050
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	55,823,200
41	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6,199,750
42	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	25,115,335
43	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	335,712,000
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	166,270,400
45	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8,343,385,000
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	61,282,330
47	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	506,110,000
48	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	870,233,400
49	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40,000,000
50	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	60,000,000
51	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10,303,717,639
52	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13,910,133,360
53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	731,952,000
54	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6,923,478,000
55	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	186,765,500
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	324,175,000
57	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11,698,680,000

58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	245,221,000
59	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,341,751,000
60	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20,781,000
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4,686,919,100
62	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,054,630,500
63	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	283,495,000
64	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1,374,692,700
65	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2,334,000
66	PROGRAM PENATAAN DESA	259,550,000
67	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	679,784,000
68	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7,348,797,600
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,008,751,350
70	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,405,135,500
71	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5,570,083,250
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	269,556,200
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6,175,750
74	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	85,578,400
75	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	249,999,800
76	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	250,000,000
77	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	991,181,000
78	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	585,578,400
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	850,190,000
80	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	845,000,000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	199,750,750
82	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	404,394,000
83	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	110,723,300
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	496,730,600
85	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	38,786,750
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	492,110,000

87	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHragaan	2,943,310,000
88	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,355,425,850
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	55,143,000
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	659,999,750
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	902,519,750
92	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,003,695,320
93	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	915,667,600
94	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	510,000,000
95	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	367,344,800
96	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	355,354,500
97	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3,685,800
98	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	346,523,250
99	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,783,071,750
100	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2,881,134,240
101	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	30,000,000
102	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	258,707,400
103	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,877,940,750
104	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	45,782,600
105	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	590,431,800
106	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	192,196,500
107	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	188,325,000
108	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	622,420,400
109	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	100,000,000
110	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	322,720,425
111	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5,656,806,800
112	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,817,346,800
113	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11,236,036,400
114	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,537,607,200
115	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,175,106,100

116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,078,337,000
117	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	377,650,267,859
118	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	852,955,000
119	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,400,472,200
120	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,712,438,400
121	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6,563,588,400
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,431,256,000
123	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,024,389,000
124	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	615,512,500
125	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,453,019,400
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	393,210,000
127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	470,270,000
128	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	955,064,000
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	208,234,547
130	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	284,213,200
131	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	822,617,900
132	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	869,355,200
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,453,805,621
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,190,225,496,441
<b>TOTAL</b>		<b>2,314,922,540,528</b>

Blitar, 26 Februari 2021  
BURATI BLITAR



Hj. RINI SYARIFAH



## BUPATI BLITAR

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. RINI SYARIFAH  
Jabatan : Bupati Blitar

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 21 Oktober 2021



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Menurunnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1   Persentase PPKS		11,7
2	Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	1   Indeks Kesalehan Sosial		80 (Baik)
3	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan	1   Harapan Lama Sekolah (HLS)		12,54
		2   Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		7,45
		3   Usia Harapan Hidup (UHH)		73,62
4	Meningkatnya kualitas kepemudaan	1   Indeks Pembangunan Pemuda		54,44
5	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	1   Indeks Kepuasan Masyarakat		81,94
6	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1   Nilai SAKIP		B
		2   Indeks SPBE		3
		3   Indeks Sistem Merit		135
		4   Persentase Desa Mandiri		4,55
		5   Indeks Inovasi Daerah		3.978
7	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat	1   Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,72
		2   Pengeluaran Perkapita (000)		11,152
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang aksessibilitas perekonomian yang berkelanjutan	1   Indeks Infrastruktur		66,88
		2   Indeks Resiko Bencana		157
		3   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		68,58
9	Meningkatnya produktifitas sektor unggulan daerah	1   Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		1,03
		2   Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		0,95
		3   Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan		1,76
		4   Jumlah Kunjungan Wisata		1.609.379
		5   ICOR		5,82

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137,998,466,501.91
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330,132,550.00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	24,040,545,200.00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	23,303,800.00
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	239,289,790,849.00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	40,919,036,388.00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	469,192,600.00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3,387,294,750.00
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23,867,032,000.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	37,475,934,250.00
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9,731,116,530.00
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	641,505,750.00
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	73,453,719,280.00
14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	75,000,000.00
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	794,749,770.00
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19,119,859,704.72
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14,051,630,500.00
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,513,903,838.00
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	37,513,023,000.00
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	299,566,500.00
21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10,628,883,331.00
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25,608,558,737.00
23	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	252,270,000.00
24	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	207,240,000.00
25	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	277,368,400.00
26	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,503,904,000.00
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	641,725,250.00
28	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5,211,319,080.00

29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3,140,336,000.00
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	661,311,880.00
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,519,944,000.00
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2,135,320,400.00
33	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20,200,000.00
34	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	548,892,300.00
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,909,014,000.00
36	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	334,027,500.00
37	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	142,554,000.00
38	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	130,015,000.00
39	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	321,705,950.00
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	48,223,200.00
41	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1,276,750.00
42	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	25,115,335.00
43	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	336,203,100.00
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	218,170,400.00
45	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8,327,960,000.00
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	224,807,330.00
47	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	506,110,000.00
48	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,033,733,400.00
49	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40,000,000.00
50	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	96,500,000.00
51	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13,616,534,871.32
52	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15,741,536,340.00
53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	701,100,050.00
54	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8,756,107,100.00
55	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	170,172,000.00
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	553,804,900.00
57	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,454,807,100.00

58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	133,717,500.00
59	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2,984,428,800.00
60	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20,781,000.00
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3,547,298,557.00
62	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0.00
63	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0.00
64	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	60,925,000.00
65	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0.00
66	PROGRAM PENATAAN DESA	375,000,000.00
67	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	654,222,000.00
68	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5,479,151,900.00
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	763,896,250.00
70	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,304,885,500.00
71	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	5,488,716,864.00
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	598,219,500.00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	4,175,250.00
74	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	85,578,400.00
75	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	249,999,800.00
76	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0.00
77	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	791,181,000.00
78	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	460,578,400.00
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	575,190,000.00
80	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	532,473,500.00
81	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	74,047,750.00
82	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	285,623,000.00
83	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99,680,300.00
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	408,925,240.00
85	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	23,581,750.00
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	642,110,000.00

87	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHragaan	1,510,810,000.00
88	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,189,525,850.00
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	61,043,000.00
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	619,999,750.00
91	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,329,816,237.00
92	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	837,452,920.00
93	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	921,801,200.00
94	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	964,788,000.00
95	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	306,860,300.00
96	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	455,355,150.00
97	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3,685,000.00
98	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	321,327,650.00
99	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,328,590,610.80
100	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2,084,605,962.00
101	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20,800,000.00
102	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	105,934,900.00
103	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,288,358,800.00
104	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	25,520,000.00
105	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	662,392,300.00
106	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	151,060,250.00
107	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	200,893,000.00
108	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,090,389,916.50
109	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	0.00
110	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	322,720,425.00
111	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,345,896,750.00
112	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,456,846,334.00
113	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	40,092,981,300.00
114	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,203,989,000.00
115	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	830,944,745.00

116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,922,413,800.00
117	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	342,333,771,187.00
118	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	959,396,100.00
119	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7,231,067,424.00
120	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,530,355,250.00
121	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,383,826,000.00
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,543,111,000.00
123	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,362,458,000.00
124	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	403,807,500.00
125	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,339,980,400.00
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	171,815,000.00
127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	401,845,000.00
128	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	497,190,000.00
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	250,077,147.00
130	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,016,839,800.00
131	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	562,963,500.00
132	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	821,919,960.00
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,428,280,988.16
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,210,070,879,586.65
<b>TOTAL</b>		<b>2,470,652,329,720.06</b>

